



**PARTAI GERINDRA
DUKUNG
PEMBATASAN
KAMPANYE**

GEMA UTAMA >>04



**UPACARA DETIK-DETIK
PROKLAMASI
Prabowo Subianto Ajak
Kader Gerindra Setia
pada Indonesia**

INDONESIA >>06



**CALEG GERINDRA
Senandung Artis
Gerindra**

FIGUR >>13

G E M A

TERBIT 16 HALAMAN/EDISI 29/TAHUN III/SEPTEMBER 2013

INDONESIA RAYA

www.partaigerindra.or.id

GELORA

TANTANGAN CAPRES

OLEH FADLI ZON

PERTENGAHAN tahun 2014, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak tantangan yang perlu diselesaikan pemimpin Indonesia di masa depan. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan setidaknya ada 4 tantangan:

Pertama, menipisnya bahan energi. Minyak bumi 12 tahun lagi akan habis. Begitu juga gas bumi tinggal 34 tahun lagi. Sebagian cadangan juga dipasok ke negara lain sehingga volume makin berkurang.

Kedua, ledakan penduduk 1,6 persen. Satu dekade mendatang akan ada 38 juta manusia baru. Presiden harus bisa menjamin pangan dan pekerjaan.

Ketiga, sistem pemerintahan yang lemah, tak efisien. Prabowo membandingkan Indonesia dengan RRC dan India. RRC 33 pemerintahan otonom, rata-rata 1 pemerintah otonom mengatur 42 juta orang. India 25 daerah otonom. Sedangkan di Indonesia, rata-rata 1 daerah otonom mengatur 497 ribu ratus orang. RRC 66 kali lebih efisien dan India 70 kali lebih efisien dari kita. Prabowo mengutip data Kementerian Dalam Negeri bahwa dari 863 Kepala Daerah yang sudah terpilih sejak masa otonomi daerah, 32 persen terjerat kasus korupsi.

Keempat, struktur ekonomi Indonesia tak seimbang dan membiarkan ketidakadilan. Pertumbuhan tinggi, kesenjangan makin tinggi. Peredaran uang secara nasional misalnya, 60% beredar di DKI, 30% di kota besar, 10% di desa. Padahal lebih dari 50% warga Indonesia tinggal di desa.

Indeks koefisien gini sangat tinggi sekarang yakni 0.41. Ini kesenjangan tertinggi sepanjang sejarah. Dengan standar internasional, ada 100 juta jiwa lebih rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini 3 kali lipat dari yang dirilis BPS. Kue ekonomi yang besar hanya dinikmati segelintir orang. Kini *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia berada di ranking 118, jauh di bawah Singapura (5), dan Thailand (46). Bahkan masih di bawah Timor Leste (113). Artinya korupsi makin parah.

Dibutuhkan pemimpin yang kuat untuk menyelesaikan berbagai tantangan tersebut. Gerindra tak pernah membatasi siapapun menjadi capres-cawapres. Semakin banyak yang maju, semakin bagus. Karena itu, Gerindra mendukung revisi UU Pilpres, termasuk soal *presidential threshold* (PT).

Partai Gerindra tak takut angka PT 20 persen. Namun, angka PT yang begitu tinggi, merupakan cermin oligarki partai. Ini bertentangan dengan semangat demokrasi. UUD 1945 pasal 6, tak menyebut ambang batas. Ini hanya kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu. Oligarki partai memangkas hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri, serta membatasi potensi munculnya capres-cawapres terbaik.

Partai Gerindra sudah menetapkan Prabowo Subianto sebagai bakal Capres. Prabowo mengatakan politik adalah cara memperbaiki kehidupan rakyat. Karena itu, pemimpin haruslah satu kata dengan perbuatan, memberi teladan, tak boleh menyalahgunakan kekuasaan. Harus jujur, melayani, tegas, dan cerdas.

Janji politik adalah sebuah utang yang harus dibayar. Di sinilah integritas seorang pemimpin diuji. Apakah ia menunaikan janji-janjinya atau sekedar ambisi merebut kekuasaan dengan segala cara. ◀



PATUK...!

KPU merevisi Peraturan No. 1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye menjadi Peraturan KPU No. 15/2013. *Membingungkan, peraturan kok dimunculkan sedikit-sedikit....*

Nama Sengman yang kabarnya dekat Istana muncul dalam kasus impor daging yang menyeret petinggi PKS.

Ayo, bongkar terus sampai tuntas....



PRABOWO SUBIANTO KADER GERINDRA HARUS MILITAN DAN KUAT

KETUA Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menekankan, setiap kader partai Gerindra agar memiliki jiwa militan dan menggalang kekuatan dengan merekrut anggota baru untuk ikut bergabung dengan Gerindra. Sebab, untuk melakukan perubahan besar di negara ini diperlukan militansi dan kekuatan yang besar.

"Partai Gerindra ingin melakukan perubahan besar. Tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan tanpa militansi dan kekuatan yang besar," kata Prabowo Subianto ketika menyampaikan sambutan pada acara halal bi halal usai menjadi inspektur dalam upacara Peringatan Detik-Detik Hari Kemerdekaan Indonesia di Aula Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 17 Agustus 2013.

Halal bi halal itu diikuti jajaran Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat, para caleg Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Daerah (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), sayap-sayap partai, ormas pendukung partai, serta para kader.

Menurut Prabowo, militansi itu diperlukan karena tantangan yang dihadapi Partai Gerindra sangat berat. "Jadi kita jangan euforia. Kita akan menghadapi tantangan, dikerjain, fitnah. Kita tahu siapa kader Gerindra yang militan. Elite-elite (politik) di Jakarta mau akal-akalan mencoba menghambat kita, mengerdilkan Partai Gerindra," katanya. Karena itu, dia meminta seluruh kader Partai Gerindra untuk lebih militan dan bekerja keras menarik anggota baru untuk menambah kekuatan.

Prabowo memberikan bukti bahwa Partai Gerindra sudah sangat populer. Dia menyebutkan ada 1,5 juta pengikut di akun *facebook* Partai Gerindra. Untuk partai politik, jumlah pengikut ini merupakan tertinggi di dunia. Sedangkan untuk pengikut akun *facebook* Prabowo

Subianto sudah melewati 3 juta. "Kalau dari pengikut kita yang 1,5 juta mencari enam tambahan anggota baru, dalam satu bulan kekuatan kita sudah 9 juta. Dalam dua bulan 18 juta. Kita akan menjadi bola salju dan gelombang yang akan membawa perubahan," kata putra Begawan Ekonomi Prof. Sumitro Djojohadikusumo itu.

Prabowo mengingatkan, Pemilu 2014 tinggal tujuh bulan lagi. Karena itu dia minta seluruh kader Partai Gerindra harus militan dan kerja keras untuk menarik pendukung sebanyak mungkin agar partai mendapat banyak suara. Ia hanya meminta setiap kader bisa mengajak minimal dua orang anggota setiap bulan. "Saya minta seluruh kader jangan lembek. Jadilah kader yang militan. Kalau tidak, copot saja baju putihmu (seragam Gerindra)," tegasnya yang disambut riuh para kader.

"Rakyat sudah dekat dan mengarah pada kita. Giliran kita mendekati pada rakyat. Saya instruksikan semua kader untuk turun ke rakyat. Ketok pintu tiap hari, cari anggota baru. Kalau bisa tambah 6 orang tiap bulan, kalau tidak bisa 5, tidak bisa juga 4 anggota tambahan, tidak bisa juga dua anggota baru. Kalau hanya dapat satu, itu keterlaluhan," tambahnya bersemangat.

Prabowo kembali mengingatkan bahwa Partai Gerindra dibentuk untuk memperbaiki kondisi negara. Partai Gerindra hanya ingin Indonesia menjadi negara yang wajar, aman, dan warga negaranya hidup dengan layak. Tidak perlu mewah namun bisa mendapatkan air bersih setiap hari dan tidak risau dan takut besok makan apa.

"Kita ingin menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang aman, damai, melindungi semua suku, agama, kelompok etnis, dan budaya daerah. Bangsa yang dipimpin oleh pemimpin bersih, jujur, adil, dan benar," katanya. ◀ **BUDI SUCAHYO**

Ingin Berkiprah di Gerindra

Salam Indonesia Raya!
Saya tertarik sekali dengan kiprah Partai Gerindra selama ini. Saya tertarik dan berminat sekali untuk bergabung, tumbuh dan ikut membesarkan Partai Gerindra. Saya memiliki banyak ide, semangat dan cita-cita yang sejalan dengan platform dan cita-cita Partai Gerindra. Sehubungan dengan hal tersebut, berkenankan saya untuk bergabung menjadi anggota partai ini, khususnya di DPP Partai Gerindra.

Latar belakang saya adalah wartawan dengan jam terbang di berbagai media sejak tahun 1990 hingga sekarang. Demikian harapan saya. Atas perhatian dan kesediaannya saya ucapkan banyak terima kasih.

HARYANTO NOOR
LAKSONO
Jakarta

Bangga dengan Gerindra

Perkenalkan saya Sigit, seorang yang sangat bangga dan teguh terhadap Partai Gerindra. Karena saya awam dari segi politik, bagaimana caranya saya untuk tetap dapat men-support, mendukung dan tetap bangga dengan partai ini.

Saya ingin bergabung langsung dengan Partai Gerindra. Mohon informasi dan masukan. Terimakasih

EL SATYA
ANDROMEDA
el_satya@yahoo.co.id

Partai Masa Depan

Menurut pertimbangan saya bahwa Partai Gerindra merupakan partai baru namun memiliki visi dan misi yang menyentuh hingga ke lapisan masyarakat bawah. Partai Gerindra berjuang untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia, dan para anggota partainya adalah mereka-mereka yang melakukan perkerjaannya dengan baik dan berkomitmen terhadap perjuangan rakyat dan masyarakat Indonesia.

Atas dasar penilaian dan pemikiran saya, bersama ini izinkan saya dapat diterima untuk bergabung dan maju bersama Partai Gerindra.

Saya yakin sepenuhnya bahwa Partai Gerindra

akan memimpin bangsa ini dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Atas perhatiannya, saya haturkan banyak terima kasih.

WAHYU PURNAMA

Kesehatan Pro Rakyat

Assalamualaikum,
Nama saya Cecep Triwibowo, S.Kep., M.Sc. Umur 25 Tahun. Saya putra asli Cilacap, alumnus Keperawatan Unsoed dan Magister Hukum Kesehatan UGM. Pernah menjadi Presiden BEM Keperawatan Unsoed dan merupakan aktivis bidang kesehatan. Saat ini berprofesi sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Cirebon dan telah menulis 4 buku bidang kesehatan.

Saya ingin berjuang bersama Gerindra, terutama dalam memperjuangkan sistem kesehatan yang Pro-Rakyat. Mohon informasi tentang tata cara dan prosedurnya. Terimakasih.

CECEP TRIWIBOWO,
S.KEP.,M.SC
Cilacap, Jawa Tengah

Partai Gerindra punya satu badan untuk kesehatan yaitu Kesira (Kesehatan Indonesia Raya). Badan ini ada juga di tiap provinsi ataupun kabupaten. Untuk itu, silahkan berkordinasi dengan DPD atau ke DPC Gerindra di daerah Anda Terima kasih.

Ingin Jadi Kader

Salam Indonesia Raya!
Nama saya Muhamad Sageri, usia 32 tahun, dan bekerja di Bank Swasta di Jakarta. Saya ingin menjadi kader partai Gerindra, mohon info perihal syarat dan ketentuan yang harus saya lakukan untuk menjadi seorang anggota.

SAGERI
Jakarta

Surat senada :

Salam Indonesia Raya!
Saya dari Parakansalak Sukabumi, ingin menjadi anggota Partai Gerindra. Bagaimana caranya dan harus datang kemana?

Terima kasih

ARIEL RAHMA
Sukabumi, Jawa Barat

Surat senada :

Dear Gerindra,
Saya berminat menjadi kader parpol dan ingin



ILUSTRASI SUSTHANTO

sekali masuk Partai Gerindra Kota Bandung, tempat saya berdiam. Saya tidak mempunyai kemampuan *funding*, tapi saya adalah seorang *economist* dan analis pasar modal/finansial yang sangat mumpuni.

Salam
RYAN NOVRIYANSAH
Bandung, Jawa Barat

Ide Kampanye

Salam hormat untuk Pak Prabowo.

Perkenalkan saya Zulkifli, lulusan Teknik Informatika. Mengapa saya memilih Partai Gerindra? Karena partai ini, menurut saya, punya ketegasan yang beda dari partai lain, dan partai ini Dewan Pembina adalah pengusaha, bukan pegawai meski dahulunya adalah Abdi Negara. Dan, saya menilai partai ini bersih, belum ada berita yang menjelekkan partai ini.

Saya mau memberikan suatu ide untuk sistem kampanye tanpa menggunakan kertas, brosur dll. secara nyata. Saya mampu membuat kampanye melalui dunia maya. Kalau Partai Gerindra b berminat dapat menghubungi saya kembali. Terima kasih.

ZULKIFLI
Bandung, Jawa Barat

Bantuan Atribut

Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Tatang Supriatna, berasal dari Subang, Jawa Barat. Id KTA Partai Gerindra: 531122 007061 212800 08233

Saya mohon maaf yg sebesar-besarnya jika ini di anggap tidak sopan atau lancang. Pastinya saya beserta semua keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga istri, serta rekan-rekan yang dapat saya percaya telah sepenuhnya mendukung Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA).

Saya berharap DPP Partai Gerindra sudi membantu sedikit atribut keluarga beserta rekan-rekan. Saya sangat mendukung sekali partai ini bersama keluarga dan rekan-rekan.

TATANG SUPRIATNA
Subang, Jawa Barat

Administrasi untuk Caleg

Salam Indonesia Raya!
Saya siap berjuang dan memberikan suara untuk Partai Gerindra dan semoga niat baik Partai Gerindra untuk perubahan sistem pemerintahan ini memberantas korupsi

semakin hari semakin menjadi, di ridhoi Allah SWT.

Saya ingin menanyakan perihal bagaimanakah tata administrasi (detail alur dari pendaftaran sampai menjadi Caleg) untuk seseorang yang ingin menjadi Caleg dari Partai Gerindra.

Demikian pertanyaan ini saya sampaikan. Atas respon dari Anda, saya ucapkan terima kasih.

RACHMANSYAH

Ingin Jadi Tim Pemenangan

Dear Bapak Prabowo, Saya Jhon, dari Medan, Sumatera Utara. Ingin memohon petunjuk ke hadapan Bapak untuk kiranya dapat menerima saya menjadi anggota/kader bapak di Medan.

Saya sudah melihat beberapa figur pemimpin, tetapi saya merasa bahwa Bapak merupakan sosok pemimpin yang cocok untuk Indonesia ini.

Saya siap untuk menjadi anggota Bapak dan menjadi tim pemenangan Bapak pada Pemilu 2014 yang akan datang.

Demikian surat ini saya buat dan kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan saya ini.

JHONDESTIN

Medan, Sumatera Utara

Perkuat Struktur Partai

Salam Indonesia Raya
Saya, Muhammad Ikwanuddin seorang anggota Partai Gerindra dan saya sangat bangga dengan Partai Gerindra. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Pimpinan Partai Gerindra bahwa untuk menang pemilu kita harus juga mempunyai pengurus yang layak dan mempunyai semangat perjuangan yang tinggi.

Dari perjalanan saya ke beberapa daerah terlihat banyak ketimpangan. Di beberapa daerah terlihat pengurusnya sangat aktif di masyarakat dengan kata lain terlihat banyak atribut yang terpasang di daerah tersebut. Saya ingin menanyakan kenapa di Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat Partai Gerindra tidak muncul seperti partai-partai yang lain?

Menurut saya DPP harus memperkuat DPD Jawa Barat supaya bias bersaing dengan partai lain mengingat Jawa Barat adalah termasuk provinsi terbesar di Indonesia, terima kasih.

MUHAMMAD
IKWANUDDIN
Subang, Jawa Barat

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160
Telp: 62-21-789 2377, 780 1396
Fax : 62-21-781 9712
Email: info@partaigerindra.or.id

**GEMA
INDONESIA RAYA**

Pembina: Prabowo Subianto **Pemimpin Umum:** Hashim Djojohadikusumo **Pemimpin Redaksi:** Fadli Zon **Wakil Pemimpin Redaksi:** M. Asrian Mirza **Dewan Redaksi:** Suhardi, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, **Redaktur Pelaksana:** Syahril Chilli **Redaktur:** Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yong W Pati (Artistik), Mustafa Kemal (foto) **Staf Redaksi:** Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika **Sekretaris Redaksi:** Wendra Wizar **Riset:** Hasby M Zamri, **Website:** Fadlun Ramadhany, Andi Nur Hamdi **Sirkulasi dan Distribusi:** Juanda Nurhakim **Umum:** Agung Budiarto, Ari Sobari **Penerbit:** Badan Komunikasi Partai Gerindra **Alamat Redaksi dan Usaha:** Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552

redaksi_gir@partaigerindra.or.id atau redaksi_gir@yahoo.com

Gerindra

@Gerindra

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.



Relasinya Sampai ISTANA

OLEH AMRAN NASUTION

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

DALAM periode pertama pemerintahannya dulu, Presiden SBY berhasil melakukan swasembada beras. Yaitu pada 2008 dan 2009. Artinya, kalau memang mau sebenarnya pemerintah bisa stop impor beras.

Tapi nyatanya kita terus-menerus menjadi negara pengimpor beras nomor satu di dunia. Indonesia kini berpenduduk 240 juta dengan laju pertumbuhan 2 persen/tahun. Maka setiap tahun penduduk bertambah 4,8 juta orang.

Jika dipakai angka konsumsi beras 120 kg per orang/tahun maka untuk mengisi mulut-mulut baru itu setiap tahun Indonesia perlu tambahan beras hampir 600 juta kg, atau persisnya 576.000.000 kg. Dari mana datangnya beras sebanyak itu?

Mestinya kita harus meningkatkan produksi dengan pencetakan sawah teknis dengan pengairan yang cukup. Dan itu bisa dilakukan di luar Jawa. Di sana lahan tersedia sangat luas. Jutaan hektar sawah baru bisa dibuka sehingga tenaga kerja yang menganggur bisa terserap.

Tapi rupanya pemerintahan Presiden SBY tak tertarik mengurus para petani kita yang merupakan mayoritas rakyat. Jangan kata mencetak sawah teknis yang baru, sawah irigasi yang dulu dibangun pemerintahan Orde Baru saja sekarang sudah banyak yang rusak. Tak aneh kalau ada yang mengejek dengan

memplesetkan zaman reformasi sebagai zaman repot nasi. Padahal karena keberhasilannya membangun infrastruktur pertanian sehingga Indonesia bisa swasembada beras, Presiden Soeharto dulu pernah mendapat penghargaan dari PBB.

Sekarang menurut data di Kementerian Pertanian sekitar 2,4 juta hektar dari 7,3 juta hektar sawah irigasi perlu direhabilitasi. Untuk itu diperlukan anggaran Rp 21 triliun. Tapi pemerintah hanya menyediakan dana Rp 6,5 triliun/tahun. Dengan demikian sawah irigasi yang rusak itu baru bisa direhabilitasi seluruhnya dalam 4 tahun. Kalau seluruh sawah yang rusak berhasil direhabilitasi, menurut Kementerian Pertanian akan terjadi peningkatan produksi beras kita 7 – 9 juta ton/tahun.

Maka untuk tahun ini saja Bulog (Badan Urusan Logistik) akan mengimpor beras sedikitnya 600.000 ton. Menurut Kepala Bulog Sutarto Alimoso kepada wartawan, impor sebesar itu diperlukan karena tahun ini produksi beras dalam negeri menurun akibat cuaca yang tak menentu (anomali) dan sistem pengairan yang rusak. Selain itu, beras di gudang-gudang Bulog dipakai pemerintah untuk program pembagian beras untuk rakyat miskin (Raskin) menyusul kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM beberapa waktu yang lalu.



“Indonesia negara agraris, mayoritas penduduknya petani. Tapi setiap tahun kita impor beras. Mengapa?”

Program Raskin itu menghabiskan sekitar 700.000 ton beras di gudang Bulog. Padahal untuk menghadapi musim paceklik Januari sampai Maret mendatang, Bulog butuh sekitar 2 juta ton beras di dalam gudangnya guna keperluan suplai dan stabilisasi harga.

Tahun lalu, menurut data BPS produksi beras nasional 69,06 juta ton padi atau 40 juta ton beras. Konsumsi beras nasional hanya 34,05 juta ton. Artinya, kalau berdasarkan data itu suplai beras dalam negeri sudah berlebih.

Kenyataannya pemerintah mengizinkan Bulog mengimpor 1 juta ton beras. Dengan izin itu kemudian Bulog mengimpor 600.000 ton beras dari Vietnam dan 70.000 ton dari India. Mengapa impor beras selalu tinggi? Konon karena di sini ada “Mafia” yang kuat, yang punya relasi sampai Istana. ◀

ILUSTRASI YONG W PATI

Tenabang Lunggana ape Lenggang?



ILUSTRASI YONG W PATI

SUDAH hampir dua bulan, Tanah Abang jadi pusat berita nasional. Pasalnya Pemda DKI berseteru dengan preman yang ingin terus berkuasa. Dampaknya, jalanan macet, kumuh dan bau. PKL yang berdagang di sekitar jalan raya Tanah Abang tidak mau ditinggalkan. Bahkan mereka menyerang Ahok yang dianggap telah memfitnah H. Lulung. Anehnya, justru H. Lulung, Anggota DPRD DKI, dan salah satu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta seperti kebakaran jenggot dan marah. Tak kurang para anggota ormas yang di bawah naungan H. Lulung dan para pendukung H. Lulung datang ke Ahok, dan mendesak Ahok agar minta maaf pada H. Lulung.

Bang Mutang, putra Tenabang asli, kaget mendengar berita itu. Karena baru tahu ada

anak Betawi namanya Lunggana. Jarang terjadi anak Betawi memiliki nama seperti itu. Biasanya anak Betawi menggunakan nama-nama Nabi ataupun nama-nama simpel. H. Mutang nggak habis pikir ada anak Betawi yang nggak mau Tenabang bersih dan tertib. Udin yang mendengar kicauan bang Mutang langsung protes.

Udin: Abang gimana sih, kita itu sekarang tergusur..?

Mutang: Tergusur gimana sih, maksud lo?

Udin: kalo PKL ditinggalkan, maka penghasilan kita hilang bang..? Apalagi kalau Tenabang tertib, bisa jatuh miskin kita..kan selama ini bongkar muat, parkir, PKL, polisi cepek dll., nyetor bang.

Mutang: Emangnye lo siapa Din, kok pade nyetor ke Elo...

Udin: Aye kan yang punya Tenabang, anak Tenabang asli, wajarkan kalau pade bayar ke aye bang...

Mutang: Eh Din, nama lo aje SAM-SUDIN LUNGGANA, lagian mana ada anak Tenabang asli, yang ada anak Indonesia, dan anak Indonesia pasti ingin Tenabang tertib, karena Tenabang itu pasar internasional, pasar kebanggaan Indonesia.

Udin diem, maklum yang diomongin bang Mutang memang benar. Justru selama ini yang bikin kerok Tenabang memang anak-anak endonan (pendatang).

Sebulan kemudian Ahok berhasil ngebersihin Tenabang, tentu saja Ahok didukung Bapak Prabowo Subianto. Dan, preman-preman Tenabangpun nggak berani lagi bersuara. Anehnya, kebijaksanaan penertiban yang dimotori Ahok tersebut dicibirkan H. Lulung. Dengan mengatakan “Saya mendukung kebijakan Jokowi, bukan Ahok”. Padahal kebijaksanaan penertiban PKL dan pembersihan Tenabang adalah kerja keras Jokowi bersama Ahok.

Bang Mutang yang membaca berita

itu kembali geleng kepala, dan memanggil Samsudin Lunggana, yang biasa di panggil Udin.

Mutang: Din, sini lo...tuh lo lihat sekarang Tenabang bersih, nggak macet, enggak bau..coba kalau lo pade nurut dari dulu sama Ahok, tentu Tenabang gampang ngebersihkannya...Yang jelas gue sebagai anak Betawi asli dukung gerakan kebersihan dan penertiban Tenabang.

Udin: tapi bang, sekarang aye hilang penghasilan...(menangis)

Mutang: Makanya hidup itu harus bersih, cari duit jangan dari meres keringat orang lain... ape selama ini rezeki lo berkah Din..setahu gue lo sakit-sakitan gara-gara makan duit PKL... nah sekarang ude sebulan PKL bersih..lo lebih kelihatan segeran...

Udin: Iye bang, aye sehat tapi kantong aye kering...

Bang Mutang hanya tersenyum. Karena dalam hidup sehat itu penting untuk membuat kita waras dan bisa beraktifitas. Uang yang diambil dari kegiatan yang tidak waras membuat kita jadi tidak waras. Nah, kalau semua waras maka Tenabang dijamin akan bersih, rapi, dan tertib.. Selamat Pak Ahok... ◀



HELMI ADAM

Pengurus DPP Partai Gerindra

Partai Gerindra Dukung Pembatasan Kampanye

KPU mengeluarkan aturan baru tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye yang membatasi alat peraga kampanye.

OLEH BUDI SUCAHYO

PEMILU legislatif memang masih sekitar tujuh bulan lagi. Namun, partai politik peserta Pemilu 2014 sudah bisa berkampanye asalkan bukan dalam bentuk rapat umum yang mengerahkan massa. Bak di komando spanduk, baliho, dan alat peraga para calon anggota legislatif pun memenuhi berbagai ruang sudut kota dan kabupaten.

Dalam perjalanannya, pelanggaran demi pelanggaran pun mulai terjadi. Iklan-iklan kampanye di media cetak dipasang besar-besar. Begitu pula iklan kampanye di berbagai stasiun televisi pun tak pernah jeda ditayangkan, terutama untuk para calon yang memiliki media televisi. Padahal, kampanye melalui iklan di media televisi hanya boleh dilakukan sepanjang 21 hari periode kampanye (16 Maret 2014 – 5 April 2014).

KPU pun mulai gerah terhadap pelanggaran kampanye di luar jadwal itu. Warga masyarakat yang terganggu pun mulai mengadu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka datang sambil melampirkan bukti-bukti adanya pelanggaran. Dari segi jumlah, memang belum banyak warga masyarakat yang melaporkan pelanggaran-pelanggaran kampanye dilakukan partai politik atau pun para calon anggota legislatif. Padahal, Bawaslu telah membuka pintu selebar-lebarnya untuk pengaduan tersebut.

Menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansah, pelanggaran terjadi apabila materi kampanye itu sudah berisi tentang visi dan misi program serta ada ajakan. "Itu bisa masuk kategori kampanye. Jadi, itu sudah kampanye di luar jadwal dan melanggar ketentuan. Tetapi, kalau misalnya seperti ucapan selamat, tidak mengajak, tidak ada pemuatan visi misi program maka itu boleh saja. Tidak ada problem," katanya.

Untuk mengatur itu semua, KPU saat ini sudah mengeluarkan aturan baru tentang pedoman pelaksanaan kampanye. Aturan baru itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan KPU Nomor



Atribut kampanye yang semrawut

FOTO ISTIMEWA

1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Salah satu poin penting dalam revisi aturan kampanye tersebut adalah ketentuan bahwa hanya partai politik yang boleh memasang baliho, billboard, reklame, dan banner. Itu pun hanya satu unit untuk satu desa/kecamatan atau sebutan lain.

Sementara itu, calon anggota DPR, DPRD, dan DPD hanya dibolehkan memasang spanduk dengan ketentuan tertentu, yaitu satu unit pada satu zona atau wilayah yang ditetapkan pemerintah daerah. Artinya, Pemda yang akan mengatur dan memiliki otoritas untuk menentukan zona yang boleh atau tidak boleh. Di situlah berlaku ketentuan pembatasan. Untuk implementasi ketentuan tersebut, KPU akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya untuk penertiban alat peraga kampanye yang melanggar sesuai aturan tersebut.

Kementerian Hukum dan HAM sudah mensahkan Peraturan KPU itu untuk diundangkan. Terbitnya peraturan KPU itu tidak jauh berselang dengan penetapan daftar calon tetap (DCT) DPR dan DPRD pada Kamis, 22 Agustus 2013. Sejak Minggu, 25 Agustus 2013, para caleg sudah diperbolehkan melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan spanduk.

Ferry mengatakan, revisi Peraturan KPU tentang pengaturan alat peraga kampanye bagi caleg dan partai politik dimaksudkan untuk

menyetarakan dan meminimalisir biaya kampanye caleg. Selain itu, untuk memaksimalkan caleg dalam berkampanye bertatap muka langsung dengan masyarakat. "Sebetulnya peraturan KPU ini dibuat agar biaya kampanye semua caleg sama dan tidak boros. Malah dengan turun langsung ke masyarakat bisa semakin dikenal," katanya.

Ferry menjelaskan, aturan tersebut dibuat untuk kesetaraan, dengan maksud tak lain karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu melihat semua caleg sama, baik caleg incumbent (petahana) maupun caleg baru. Aturan itu dibuat untuk kesetaraan, keadilan, dan keberimbangan di antara para caleg. Dengan aturan itu, maka setiap caleg bisa turun menyapa masyarakat secara langsung, bukan dengan alat peraga semacam baliho atau billboard.

Gerindra mendukung

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendukung KPU untuk membatasi kampanye alat peraga bagi caleg dan partai politik seperti tertuang pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani setuju dengan prinsip pembatasan alat peraga agar tidak terjadi pemborosan biaya politik.

Namun, Muzani menilai KPU lebih baik memperketat pengawasan terhadap terjadinya politik uang dibandingkan pembatasan alat peraga kampanye. "Menurut saya itu

harus dipikirkan sehingga tidak ada biaya-biaya yang terbuang percuma," katanya. Apalagi sistem Pemilu yang dianut saat ini menggunakan sistem suara terbanyak. Dengan begitu, caleg membutuhkan banyak media untuk sosialisasi.

Menurut Muzani, caleg tidak cukup hanya dikenal wajahnya, tetapi juga ide dan pandangannya. "Memang harus diakui caleg lebih banyak memperkenalkan nama dan wajahnya saja. Namun pikiran dan idenya belum tersosialisasi" ujarnya. Untuk menjangkau suara, tiga hal yang harus disampaikan caleg, yaitu: wajah, nama, dan visi. Karena itu, perlu ruang dan waktu agar masyarakat bisa memahami sosok caleg yang ingin dipilih.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, juga setuju bahwa pada dasarnya alat peraga dan iklan kampanye mesti diatur. Dia lebih mempermasalahkan sosialisasi dari KPU terhadap aturan pembatasan itu. "Sejauh ini kita melihat aturan main dari KPU dikeluarkan sedikit demi sedikit, bukan suatu keseluruhan yang terintegrasi. Ini membuat partai dan caleg kesulitan untuk mengetahui aturan main dari KPU," katanya.

Menurut Fadli Zon, KPU seharusnya mengajak partai politik berembuk sebelum mengeluarkan aturan main. "Saya kira KPU jangan sepihak tetapi melibatkan partai politik agar di kemudian hari tidak ada komplain dari partai politik karena sejak awal sudah mengetahui kondisi dan kesepakatan awal yang diambil," katanya. Terbukti,

aturan KPU yang baru (Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013) masih menimbulkan kontroversi di kalangan partai politik.

"Jadi aturan main ini jangan dikeluarkan sedikit demi sedikit yang membuat partai politik atau caleg kebingungan. Seharusnya KPU mengeluarkan satu paket aturan dan juga melibatkan partai politik peserta pemilu," tambahnya.

Fadli Zon juga menyoroti iklan kampanye di televisi. Aturan kampanye iklan di televisi harus lebih jelas, yaitu larangan iklan yang berisi visi, misi, dan program partai serta ada unsur mengajak. Iklan kampanye di televisi hanya diperbolehkan 21 hari sebelum masa tenang, menjelang hari H Pemilu (9 April 2014). "Kita setuju dengan aturan itu. Tetapi KPU juga harus melihat bagaimana mereka yang memiliki (stasiun) televisi, apakah boleh menggunakan televisi untuk kepentingannya," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa frekuensi adalah ruang publik. "Bukan kita iri tidak memiliki stasiun televisi, tetapi di negara manapun iklan di televisi diatur dengan jelas. Kita juga sudah mengatur, namun tidak ada law enforcement-nya," ujar Fadli. Contohnya, meski sudah ada aturan, tetapi diakali dengan membuat iklan-iklan yang menyembunyikan visi, misi, dan program. "Kalau greeting seharusnya tidak masalah, tetapi ada iklan politik terselubung yang muncul setiap hari meski tidak menyebut nama partai. Jadi, aturan mainnya juga harus jelas," ucapnya. ◀

PEMBATASAN KAMPANYE Inilah Peraturan KPU Terbaru

Peraturan KPU menyebutkan soal larangan pemasangan alat peraga kampanye di sembarang tempat. Aturan ini dimaksudkan untuk menciptakan persaingan yang adil sekaligus mengurangi terganggunya publik akibat maraknya baliho kampanye.

OLEH BUDI SUCAHYO



Penertiban atribut kampanye di jalanan

FOTO ISTIMEWA

SEJAK Januari 2013, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya sudah mengeluarkan aturan berisi rambu-rambu kampanye bagi partai politik dan calon anggota legislatif (Caleg). Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Peraturan itu dikeluarkan tak lama setelah KPU menetapkan partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Sebelumnya, KPU sudah mengumumkan partai politik yang menjadi peserta Pemilihan Umum 2014. Dari hasil verifikasi terhadap partai politik, KPU menetapkan 10 partai politik akan mengikuti Pemilu 2014, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Menyusul kemudian, KPU menetapkan lagi dua partai politik peserta Pemilu 2014, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI). Sehingga Pemilu 2014 diikuti 12 partai politik nasional.

Terhitung sejak 11 Januari 2013, berdasarkan peraturan itu, KPU melarang kampanye partai politik yang memanfaatkan media

massa, baik media cetak maupun media elektronik sampai 15 Maret 2014. Aturan itu juga menyebutkan larangan kampanye dalam bentuk stiker, rapat terbuka yang dihadiri massa, serta larangan beriklan di televisi. Setelah tanggal 15 Maret 2014 hingga minggu tenang (16 Maret hingga 5 April 2014) sebelum Pemilu 2014, barulah partai politik boleh berkampanye.

KPU mengizinkan partai politik peserta Pemilu 2014 dan para Caleg untuk mematuhi aturan kampanye itu seperti tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan KPU. Caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT). Artinya, pencalonan Caleg yang sudah masuk dalam DCT dapat dibatalkan.

Pada September 2013 ini, KPU telah menetapkan DCT anggota DPR sebanyak 6.607 orang. Para caleg itu akan memperebutkan 560 kursi di 77 daerah pemilihan (dapil) seluruh Indonesia. Jumlah ini masih bisa berubah apabila ada hasil gugatan sengketa atas caleg yang gagal. Jumlah itu juga bisa berkurang jika ada caleg yang meninggal atau terbukti memalsukan dokumen setelah penetapan DCT. KPU akan mencoret nama Caleg tanpa ada penggantian.

Seiring dengan penetapan DCT, KPU juga merevisi peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu. Revisi itu tertuang dalam

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Peraturan KPU soal revisi itu sudah disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Salah satu soal yang diatur dalam revisi itu adalah pembatasan alat peraga dalam masa kampanye. Peraturan KPU menyebut tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye seperti di tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah, sekolah, dan sarana publik lain. Selanjutnya, peserta Pemilu hanya boleh memasang alat peraga kampanye berbentuk baliho maksimal di dua titik pada tiap kecamatan.

Untuk menetapkan lokasi pemasangan, KPU, KIP Provinsi, Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia. Begitu pula dengan penertiban alat peraga kampanye. Pemda setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut, atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dulu kepada peserta Pemilu bersangkutan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu kabupaten/kota.

Revisi Peraturan KPU itu dibuat dengan mengasumsikan bahwa kampanye akan didominasi oleh peserta yang memiliki kemampu-

an materi. Pembatasan dilakukan untuk memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat antara peserta Pemilu. Selain itu, pembatasan alat peraga kampanye bisa mengurangi gangguan pandangan publik akibat baliho yang tersebar di sembarang tempat.

Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik, setelah sah menjadi sebuah peraturan, KPU akan mengundang partai politik untuk mendapatkan sosialisasi terkait aturan dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013. "Kami akan menyam-

paikan bimbingan teknis ke KPU daerah, bagaimana caranya memfasilitasi penyelenggaraan kampanye dan lain sebagainya," ujar Husni kepada pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin 2 September 2013.

Husni menyebutkan, salah satu yang akan disosialisasikan dan dikoordinasikan dengan partai politik dan pemerintah daerah adalah soal zonasi yang akan menjadi tempat pemasangan alat peraga partai politik dan Caleg. Tujuannya adalah agar pemasangan alat peraga bisa tertata, memudahkan pemilih untuk melihat, mempelajari dan mengenali calegnya. "Kalau ditempatkan pada kawasan tertentu, alat peraga itu justru akan mempermudah bagi pemilih untuk melihatnya," tambah Husni.

Akan dibongkar

Menyusul terbitnya peraturan baru ini, KPU mulai bersikap tegas terhadap atribut kampanye yang melanggar aturan yang terpampang di berbagai pelosok. KPU memberi waktu satu bulan bagi Caleg dan partai politik untuk mencopot seluruh atribut dan alat peraga kampanye tersebut. "Dengan luas wilayah Indonesia dan banyak para caleg yang sudah mulai memasang alat peraganya, kami mempertimbangkan satu bulan itu merupakan waktu yang moderat. Cukup untuk mereka berinisiatif mencopotnya atau nanti pemda yang menertibkan," kata Husni.

KPU sendiri tidak akan menertibkan alat peraga. Penertiban akan dilakukan pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah di seluruh Indonesia terkait penertiban itu. Surat edaran itu disampaikan kepada gubernur, bupati, wali kota, supaya para kepala daerah itu segera mengeksekusi Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013. ◀

RAMBU-RAMBU KAMPANYE

PELAKSANA, peserta, petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Juga dilarang melakukan hal-hal membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain.

Juga dilarang menghasut dan mengadu domba, mengganggu ketertiban umum, mengancam dan melakukan kekerasan, merusak alat peraga kampanye peserta Pemilu lain, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan pendidikan, menjanjikan dan memberikan uang atau materi lain kepada pemilih.

Pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memerhatikan redaksional materi kampanye sebelum ditayangkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti, dan menyeleksi materi kampanye dari peserta Pemilu. Media massa cetak, *online*, elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye serta larangan berkampanye. ◀

UPACARA DETIK-DETIK PROKLAMASI

Prabowo Subianto Ajak Kader Gerindra Setia pada Indonesia

Untuk pertama kalinya, Partai Gerindra menggelar upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan inspektur upacara Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

OLEH BUDI SUCAHYO

SEJAK berdiri tahun 2008, untuk pertama kalinya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kemerdekaan Indonesia dengan menyelenggarakan upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Upacara berlangsung di halaman Kantor DPP Partai Gerindra Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta, pada Sabtu 17 Agustus 2013. Dalam upacara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi inspektur upacara.

Upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dimulai ketika Prabowo Subianto memasuki tempat upacara pada pukul 09.45 WIB. Mengenakan seragam Partai Gerindra dengan kopiah hitam, Prabowo Subianto berjalan menuju panggung didampingi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi, dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Di panggung dan tempat duduk di kiri dan kanan panggung sudah hadir jajaran dewan pembina, dewan penasihat, dewan pakar, pengurus DPP, anggota DPR dari Partai Gerindra, para caleg, pengurus DPD (ketua, sekretaris, dan bendahara), sayap-sayap partai dan ormas pendukung Gerindra. Juga para kader Partai Gerindra yang sudah berdiri di seputar lapangan upacara. Peristiwa ini juga disaksikan oleh masyarakat umum yang tampak berdiri di luar pagar kantor DPP Partai Gerindra.

Begitu upacara dimulai, komandan upacara Kharisma Febriansyah (Ketua Bidang Olah Raga DPP dan Komandan Batalyon Pusdiklat Partai Gerindra) melaporkan bahwa upacara siap dilaksanakan. Selanjutnya, inspektur upacara Prabowo Subianto membacakan naskah Proklamasi. Dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dan pengibaran sang Merah Putih oleh Laskar Garuda Partai Gerindra.

Upacara memperingati Hari Kemerdekaan ke-68 yang berlangsung khidmat itu diakhiri dengan pembacaan doa oleh Ketua Bidang Agama DPP Gerindra, Habib Mahdi



Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 68, di kantor DPP Gerindra

FOTO MUSTAFA KEMAL

Alas. Sebelum meninggalkan tempat, inspektur upacara menyaksikan penampilan *marching band* Camka Garuda Yaksa yang membawakan beberapa lagu perjuangan dan mars Partai Gerindra. Atraksi *marching band* di lapangan rumput itu cukup memukau penonton. Berkali-kali terdengar tepuk tangan penonton.

Upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan merupakan awal dari kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan ke-68 di kantor DPP Partai Gerindra. Kegiatan lainnya adalah halal bi halal, lalu pesta rakyat berupa panjat pinang, tarik tambang, dan perlombaan lainnya. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra memberikan sambutan tentang Kemerdekaan Indonesia pada saat acara halal bi halal.

Prabowo Subianto dalam kesempatan itu mengajak seluruh kader Partai Gerindra yang baru saja mengikuti upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia untuk terus memupuk nasionalisme. "Kalau kita tidak bangga dengan sejarah kita, siapa lagi yang akan bangga? Kalau kita tidak menghormati bendera kita sendiri, siapa yang akan menghormati?" katanya.

Prabowo menambahkan, perayaan Kemerdekaan RI kali ini juga disertai ironi, khususnya tentang persoalan korupsi. "Kita bangun tiap hari, kita melihat TV, membaca koran, hari demi hari banyak sekali pejabat dan pemimpin kita satu per

satu ditangkap KPK. Di saat rakyat kita masih banyak di bawah garis kemiskinan, begitu banyak orang pintar dan berkuasa yang mencuri uang dari rakyat, dan semua elite tenang-tenang saja," ujarnya.

"Kalau lurah, kades, camat, gubernur, menteri sudah maling, bagaimana negara kita bisa maju," katanya lagi. Mantan Danjen Kopassus itu bahkan tak jarang terlihat mengetuk-ngetuk mimbar tempat berpidato dengan cukup keras. Melihat kondisi negara seperti itu, Prabowo mengajak semua kader Partai Gerindra untuk saling mengoreksi dan mawas diri. Dia juga mengajak semua kader Gerindra untuk setia kepada Indonesia.

"Apakah kita setia kepada Indonesia, kepada Merah Putih, pendiri-pendiri bangsa atau kita sama dengan yang lain? Penting saling mengoreksi dan mawas diri," tegasnya. Dalam mawas diri itu, Prabowo mengingatkan bahwa perjuangan terberat setelah kemerdekaan adalah menghadapi bangsa sendiri yang mengkhianati cita-cita kemerdekaan.

Kesenjangan sosial

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, juga melihat korupsi sebagai masalah utama bangsa Indonesia. Pada perayaan HUT Ke-68 Kemerdekaan Indonesia, nasib bangsa ini memang lebih baik dibanding masa

penjajahan. Kehidupan masyarakat berjalan normal, kondisi ekonomi makro sekilas baik-baik saja seperti tertera dalam angka-angka dan indikator ekonomi yang tampak bagus.

"Namun jika kita berpijak pada realitas, angka-angka itu tak mencerminkan kenyataan. Kehidupan berbangsa kita masih karut marut. Banyak penindasan, hukum tumpul ke atas, tak adanya keadilan, menjadi catatan yang harus kita perbaiki bersama. Fenomena paling luar biasa tentu saja korupsi. Tiada hari tanpa korupsi. Korupsi mewabah di semua lini kehidupan, menyeruak di setiap celah kegiatan. Tidak pandang bulu. Korupsi merasuki lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Korupsi menyebar ke partai politik hingga ke sekolah dan perguruan tinggi. APBN menjadi sumber perburuan rente dan sumber dari segala sumber korupsi," paparnya.

Kepada kader Partai Gerindra, Fadli Zon berharap, HUT Kemerdekaan RI kali ini merupakan momentum penting untuk membangkitkan semangat seluruh kader Partai Gerindra dalam menghargai jerih payah dan pengorbanan para pahlawan. "Tentunya dengan terus berusaha membangun negeri ini," katanya.

Berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, Ketua DPP Martin Hutabarat masih melihat kesenjangan sosial yang luar biasa di masyarakat. Seperti disebutkan

dalam Pidato Kenegaraan dan Pengantar Nota Keuangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan sidang gabungan DPR dan DPD pada Jumat, 16 Agustus 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus.

Cuma, kata Martin, dari sejak awal kesenjangan sosial dibiarkan melebar. "Itu adalah kesalahan Orde Baru yang berhasil dalam pertumbuhan ekonomi namun gagal dalam pemerataan," katanya. Karena tidak ada pemerataan dan terjadi kesenjangan yang sangat timpang maka akhirnya meledak dalam bentuk reformasi tahun 1998.

"Jadi, pemerintahan sekarang jangan lagi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan. Itulah yang harus dilakukan," kata anggota Komisi III DPR RI ini.

Menurut Martin, kesenjangan (gap) di masyarakat saat ini sudah sangat lebar. "Dalam pidato Presiden SBY disebutkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia sudah mencapai US\$ 3.000, namun kesenjangan yang terjadi juga luar biasa. Orang yang kaya semakin kaya, sedangkan orang miskin tidak mampu lepas dari kemiskinan. Kita harus mulai melakukan pemerataan. Kesenjangan yang melebar itu jangan dibiarkan, karena bisa jadi nanti kita akan mengalami revolusi lagi," pungkasnya. ◀

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra H. Prabowo Subianto pada Idul Fitri 1 Syawal 1434 H bertepatan dengan 8 Agustus 2013 melaksanakan shalat Ied di Masjid Al Barkah, Tebet, Jakarta Selatan bersama masyarakat setempat.



FOTO-FOTO ANGGA PRABOWO

Tak Menyentuh Penegakan Hukum

Pidato kenegaraan Presiden SBY dikritik politisi Gerindra. Soal korupsi dan narkoba tak disinggung sama sekali.

OLEH IMAN FIRDAUS

TIGA hari menjelang hari kemerdekaan RI ke 68, 17 Agustus 2013, Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berita ini sangat menggemparkan karena Rudi yang pernah berada di posisi sebagai Wakil Menteri ESDM itu dikenal sebagai sosok cerdas dan baik. Rudi ditangkap hanya sepekan setelah Lebaran dan tiga hari menjelang peringatan hari kemerdekaan.

Suasana negara menjelang ulang tahun kemerdekaan pun makin murung, sebab kasus narkoba makin

merajalela seolah tak bisa ditangani. Kasus barang haram itu ditemukan dengan mudah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), bahkan ironisnya melibatkan petugas Lapas. Berita itu seperti ikut mencoreng wajah negeri yang penuh guratan kasus korupsi ini.

Dua hari kemudian, tepatnya 16 Agustus, Presiden memberikan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen. Pidato menyambut hari kemerdekaan itu biasanya ditunggu banyak kalangan. Sebab dari pidato tersebut, presiden akan memaparkan capaian-capaian yang diraihinya

selama selama memerintah. Baik di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan politik.

Namun dari pidato yang cukup panjang itu ternyata presiden tidak menyentuh sedikit pun soal pemberantasan korupsi. Padahal, kasus tertangkapnya Rudi benar-benar membuat semua orang terperangah. Betapa korupsi masih terus merajalela di usia republik yang sudah 68 tahun.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat pun langsung memberikan kritik atas pidato presiden tersebut. Menurut

Martin, SBY sama sekali tidak menunjukkan tekad untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi dan tindak kekerasan yang belakangan ini marak terjadi.

"Kemarin kita heboh soal pabrik narkoba di lapas, tapi dia tidak bicarakan. Presiden sama sekali tidak menunjukkan tekad penegakan hukum memberantas kekerasan. Ini bukti kekerasan menjadi musuh besar kita," katanya. Menurut anggota Komisi III ini, presiden seharusnya memfokuskan diri pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di sisa pemerintahannya.

"Saya lihat tidak terlihat dalam pidato kenegaraan. Soal hukum dia tidak tunjukkan. Padahal yang penting ditunjukkan dalam 1,5 tahun ke depan pembenahan hukum yang semrawut, pemberantasan narkoba," kata Martin.

Martin pantas geram, sebab dari hasil temuan Tim Kemenkumham dan Komisi III DPR, sekitar 60% dari rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia dihuni oleh pengguna narkoba. Karena pengguna narkoba jadi mayoritas di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan, maka dua lokasi tersebut dengan sendirinya sangat prospektif sebagai tempat bisnis sekaligus pabrik narkoba. "Lapas dijadikan area produksi sekaligus pasar yang sangat potensial. Karena itu para pengguna narkoba setelah keluar dari lapas tetap tergantung pada narkoba," ujar Martin.

Ia pun berharap agar SBY menjadikan HUT ke-68 RI sebagai momentum memberantas narkoba dengan meluncurkan satu kebijakan yang berkeadilan dan mendidik bagi para korban narkoba. "Korban

narkoba jangan dipenjara. Mereka itu sesungguhnya butuh rehabilitasi dan penyadaran atas kekeliruannya menggunakan narkoba," ujarnya.

Sementara Presiden SBY dalam pidatonya lebih banyak mengungkapkan keberhasilannya dalam bidang ekonomi. "Strategi pembangunan ekonomi kita tetap mengedepankan aspek keseimbangan dan keberlanjutan. Selama sembilan tahun ini, keseimbangan pembangunan dilakukan melalui empat strategi dasar; yaitu pertumbuhan, lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengelolaan lingkungan. Yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, yakni pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, dengan tetap menjaga daya dukung alam. Selama ini keempat hal tersebut dapat kita lakukan secara bersamaan. Program peningkatan kesejahteraan secara konsisten juga kita lakukan melalui program-program pro-rakyat," katanya.

Saat ini, kata SBY, Indonesia merupakan negara berpendapatan menengah dengan tingkat kemiskinan yang secara bertahap berhasil kita turunkan. Penduduk miskin turun dari 16,66% pada 2004, menjadi 11,37% pada Maret 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diturunkan dari 9,86% pada 2004 menjadi 5,92% pada Februari 2013.

"Meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu terus kita perbaiki, berkurangnya penduduk miskin dan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia merupakan bukti penting keberhasilan pembangunan nasional yang kita lakukan bersama," tambahnya. ◀



FOTO MUSTAFA KEMAL

FADLI ZON:

Revolusi Perubahan Harus Dari Atas

WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan figur Presiden Indonesia 2014 akan menentukan perubahan Indonesia. Ini disebabkan perubahan yang terjadi harus dimulai dari atas, yakni dimulai pemimpinnya yang kemudian diikuti oleh masyarakat. Karena itu, masyarakat harus memilih dengan tepat pemimpin Indonesia pada Pemilu Presiden tahun 2014.

“Kalau masyarakat memilih calon presiden yang tepat, maka akan membawa pengaruh positif selama lima tahun ke depan dan bahkan 50 tahun. Sebaliknya, kalau masyarakat salah memilih figur calon presiden maka akan membawa pengaruh negatif selama lima tahun bahkan sampai 50 tahun,” kata Fadli Zon pada diskusi “Dialog Pilar Negara: Geliat Para Capres Jelang 2014” di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin 2 September 2013. Pembicaraan lain dalam dialog yang diselenggarakan MPR RI, diikuti para wartawan parlemen ini adalah Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari dan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti.

Fadli Zon mencontohkan perubahan dari atas itu seperti dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Perubahan yang terjadi di DKI Jakarta dimulai dari pemimpinnya (gubernur). “Jika pemimpin di atas bersih, maka di bawahnya pun akan bersih,” ujarnya.

Perubahan yang dilakukan pemimpin akan diikuti oleh masyarakat. “Kalau perubahan terjadi dari bawah maka akan muncul situasi ‘chaos’ seperti yang terjadi pada tahun 1998,” kata Fadli Zon. Karena itu, masyarakat harus memilih pre-



FOTO ANDI NUR HAMDI

siden yang bisa membawa perubahan.

Fadli menjelaskan, figur calon Presiden Indonesia selama lima tahun ke depan adalah figur yang melayani, jujur, dan tegas. “Figur calon presiden harus memiliki komitmen siap melayani masyarakat,” sebutnya.

Dia juga mengemukakan bahwa partai politik harus bersikap terbuka kepada masyarakat mengenai calon presiden yang diusungnya dan berbagai program kerja partai. Partai Gerindra sudah melakukan dengan mengumumkan program partai (6 Program Aksi Partai Gerindra) dan menegaskan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. “Kalau

partai politik tidak terbuka, maka dikhawatirkan masyarakat seperti membeli kucing dalam karung,” kata Fadli Zon.

Partai Gerindra sudah menyiapkan program apabila berkuasa kelak. “Jadi, tidak seperti sekarang, sudah memiliki kekuasaan tetapi bingung dengan kekuasaannya. Sehingga masyarakat pun dibuat bingung. Kita akan merebut kekuasaan dan mempunyai program bagaimana mengisi kekuasaan itu,” kata Fadli Zon yang juga Sekretaris Jenderal DPN HKTI itu.

Salah satu program Partai Gerindra adalah mencetak satu juta hektar lahan sawah. Partai Gerindra, kata Fadli Zon, berani melakukan debat program sehingga demokrasi

Masyarakat harus memilih dengan tepat pemimpin Indonesia pada Pemilu Presiden 2014. Kalau salah memilih maka akan membawa pengaruh negatif lima tahun ke depan bahkan hingga puluhan tahun.

OLEH BUDI SUCAHYO

yang tercipta tidak lagi demokrasi yang teknikal melainkan sudah substansial.

Soal Ibu Negara

Dalam dialog itu juga muncul pertanyaan tentang siapa ibu negara apabila Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Pertanyaan tentang ibu negara ini kerap muncul di masyarakat. “Jodoh kan di tangan Tuhan. Kalau Prabowo terpilih jadi Presiden dalam Pemilu 2014 mendatang pastilah mudah dan Insya Allah ada ibu negara,” jawab Fadli Zon.

Kalau Tuhan nantinya juga tidak memberi jodoh, tambah Fadli Zon, sesungguhnya juga tidak ada masa-

lah. “Tidak akan ada masalah andai ibu negara tidak ada. Malah bisa lebih hemat karena tidak ada anggaran untuk ibu negara,” ucapnya. Bahkan sejumlah negara di Eropa seperti Inggris juga ada seorang perdana menteri yang tidak punya suami. “Dalam beberapa kali pertanyaan, perdana menteri itu mengatakan, dia mengawini Inggris. Bukan seorang laki-laki,” sebut Fadli.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari menjelaskan, soal ibu negara tidak ada ketentuan dalam konstitusi. “Di UUD NRI Tahun 1945 tidak ada kata ibu negara. Yang ada hanya kepala negara. Jadi kata ibu negara itu hanya konvensi kenegaraan saja,” katanya. ◀

Oh Kedelai, Dimana Kau Kini

Masalah kelangkaan kedelai diikuti melonjaknya harga bahan baku tahu tempe itu selalu berulang. Sampai kapan nasib produsen tahu tempe dibiarkan begini.

OLEH M. BUDIONO

SELAMA tiga hari, Senin hingga Rabu (9–11 September), jenis bahan makan tahu tempe menghilang dari los-los atau lapak-lapak pasar tradisional di Jakarta dan sekitar. Di pasar Depok dan pasar Parung Bogor, keduanya di Jawa Barat, sejak Senin dini hari hingga Rabu itu tak seorang pun pedagang tahu tempe menampakkannya, menjajakan dagangannya.

Hal serupa juga terjadi di pasar-pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta. Di pasar Jatinegara, Jakarta Timur, misalnya, los-los tahu tempe tampak kosong melompong. Sedangkan di pasar Mampang, Jakarta Selatan, hanya tampak satu pedagang tempe yang menjajakan dagangannya. Itupun hanya sebentar, ia tutup setelah beberapa saat berjualan.

Itulah bentuk protes yang dilakukan oleh para produsen dan pedagang tahu tempe sebagai tanggapan terhadap melambungnya harga kedelai, bahan baku tahu tempe, beberapa waktu terakhir ini. Ini bukan pertama kalinya para produsen dan pedagang tahu tempe mengajukan protes, dengan cara mogok nasional, tidak berproduksi selama beberapa hari. Pada Juli 2012 hal serupa juga terjadi, dan sekarang (setahun kemudian) hal serupa kembali berulang.

Meski persoalannya sama,

kenaikan harga kedelai, kondisi sekarang ini lebih menyedihkan dibanding 2012. Setahun lalu, lonjakan harga kedelai di pasaran tertinggi berkisar Rp 8.500/kg dari harga biasanya Rp 6.000/kg. Sedangkan sekarang lebih parah, dari Rp 7.000 per kg melonjak menjadi Rp 11.000 per kg. Salah satu penyebab terjadinya lonjakan harga kedelai (impor) sekarang ini ditengarai sebagai akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

Kondisi seperti itu sulit dihindari selagi kita tetap tergantung pada kedelai impor. Perlu diketahui, tahun 2012 kebutuhan kedelai Indonesia mencapai 2,4 juta ton, sementara produksi dalam negeri hanya 779.800 ton. Artinya, kita harus impor kedelai sebesar 1,25 juta ton agar kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Ketergantungan terhadap impor ini bukan tanpa risiko. Setiap terjadi gangguan musim di negara

pengepor dampaknya terasa di dalam negeri.

Seperti tahun sebelumnya, untuk mengatasi tingginya harga kedelai, pemerintah menyiapkan langkah-langkah (janji) yang akan diambil. Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Bambang Budianto, dalam diskusi publik Partai Gerindra bertema: ‘Kedelai, di Mana Kau Kini’, awal bulan lalu, menyatakan, pemerintah akan memperluas areal tanaman kedelai baru 118.250 hektar. Lalu, bantuan paket saprodi lengkap, perluasan areal tanam swadaya petani 190.250 hektar, dan bantuan pembiayaan.

Menanggapi rencana pemerintah itu, dewan Pembina Forum Bersama (Forbes) – yang beranggotakan 10 asosiasi pengusaha tahu tempe -- Joko Ferry Cadharyanto mengatakan, apa yang disampaikan pemerintah itu hanya janji semata. Terbukti dari tahun ke tahun

persoalan mahal dan hilangnya kedelai dari pasaran selalu berulang. Karena itu, menurut Joko, pihaknya sudah lelah mendengarkan janji-janji yang disampaikan pemerintah itu.

“Intinya begini, sampai kapan pemerintah akan membiarkan pengusaha tahu tempe, yang juga rakyat Indonesia, itu hidup terus begini. Lagi-lagi mereka saling menyalahkan, tanpa mengambil solusi untuk mengatasi persoalan sebenarnya”, tegas Joko.

Menurut Joko, tanpa melemahnya nilai tukar rupiah harga kedelai dipastikan naik. Karena saat ini merupakan siklus kenaikan harga kedelai. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain pengalihan kedelai dari bahan pangan menjadi biofuel. Karena itu tidak ada cara lain bagi pemerintah, menurut Joko, selain memenuhi sendiri kebutuhan kedelainya. ◀



Waskita Rini

KEPALA DEPT. PENGENDALIAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

“Butuh Kesadaran
Bersama”

FOTO MUSTAFA KEMAL

TAK lama setelah Partai Gerindra lahir, Waskita Rini langsung memutuskan, bergabung dengan partai berlambang kepala Garuda ini. Tak tanggung, ia selalu tampil dalam setiap gerak dan langkah DPP Partai Gerindra. Berbagai kegiatan, baik di DPP Gerindra maupun organisasi sayap pernah ia rasakan. Waskita pernah menjadi Wakil Sekjen DPP, Ketua Bidang Pendidikan PP PIRA, dan sekarang Kepala Departemen Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Selain itu, dia juga selalu terlibat dalam setiap kegiatan kepanitiaan DPP Gerindra.

Bagi Rini, kelahiran Partai Gerindra, sama artinya dengan kelahiran kesadarannya terhadap dunia politik. Sebelum Gerindra lahir, Waskita praktis tak pernah bersentuhan dengan dunia politik. Paling sekedar mengagumi beberapa aktor politik yang timbul tenggelam kala itu. Sampai suatu ketika sahabatnya mengajak bergabung dengan Gerindra. Sejak itulah ia mulai tenggelam dalam kubangan politik bersama Gerindra.

Politik agaknya sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski gagal menjadi anggota legislatif pada pemilu 2009, tapi Waskita tidak kapok. Kini ia sibuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014 dengan lebih optimistis. Waskita sudah jauh-jauh hari Waskita telah melakukan sosialisasi. Bahkan hampir di sepanjang waktu, ia gunakan untuk bercengkerama bersama konsituennya di dapil Jawa Tengah 8, meliputi Cilacap dan Banyumas.

Beberapa waktu lalu, Waskita Rini menerima wartawan *Gema Indonesia Raya* (GIR) untuk sebuah wawancara di Sekretariat DPP Gerindra, Jl. Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perempuan yang semasa mahasiswa menempa dirinya di organisasi pecinta alam HIMPALA (Himpunan Mahasiswa Pecinta Alam) Unas Jakarta. Kepada GIR, ia berbicara mengenai

bidang ia geluti di DPP, yakni lingkungan hidup. Berikut petikannya.

Bagaimana ibu melihat kerusakan lingkungan sekarang ini?

Sangat memprihatinkan. Kita khawatir dengan maraknya kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, pembantaian binatang buas di lahan pembukaan pertanian dan perkebunan. Juga pengrusakan alam berlatar belakang ekonomi. Kita juga menghadapi persoalan polusi udara sampai rumah kumuh. Dari sisi moral, masyarakat tengah menghadapi berbagai persoalan yang tidak bisa dibilang ringan. Inilah yang menjadi *concern* kita.

Kendala apa saja yang dihadapi oleh departemen yang ibu pimpin?

Tentu masalahnya klasik, soal pendanaan. Tapi, kami tidak berpangku tangan hanya karena keterbatasan keuangan. Setiap ada acara yang direncanakan kita upayakan untuk bisa lakukan dengan swadaya.

Dengan segala keterbatasannya, apa saja yang sudah dilakukan?

Kita sudah laksanakan Gladian I di Gunung Kidul Jogjakarta, November 2011, dengan peserta sebanyak 75 orang. Kegiatan ini, selain latihan fisik para peserta juga mendapat latihan mental serta moral. Kegiatannya diantaranya membersihkan pantai. Untuk ini, kita memberikan contoh kepada masyarakat dengan harapan bisa ditiru dan dilakukan oleh masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, kita juga memberikan bantuan bibit, pupuk, menanam pohon kayu, dan juga masuk ke gua Kindoro. Dan, sejak itu pula, gua tersebut dikenal sebagai kawasan wisata. Pada saat pelaksanaan Gladian I, Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto menyerahkan bantuan sebesar Rp

400 juta kepada masyarakat Gunung Kidul. Sejumlah petinggi Partai Gerindra ikut hadir ke sana, termasuk Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

Hal menggembarakan, saat ini Gunung Kidul sudah menjadi salah satu obyek wisata alternatif di wilayah Jogjakarta. Banyak turis luar negeri datang dan tinggal di sana. Ini terjadi karena kawan-kawan semakin intens mengampanyekan Gunung Kidul melalui media sosial. Selain itu, sudah banyak televisi memberitakan wisata di sana dan itu berpengaruh positif.

Setahun berikutnya, kita melaksanakan Gladian II di Karangasem Bali. Di sana, antara lain kita melaksanakan Bazar Tradisional Rakyat Bali. Para peserta berkesempatan mengunjungi Desa Tenganan, sebuah desa dengan kondisi lingkungan hidup yang sangat baik, bahkan terbaik se Indonesia. Di wilayah

Dari apa yang selama ini kita pelajari, saya yakin, sebenarnya perbaikan alam itu bukan mimpi. Hanya saja kita masih terbentur dengan persoalan kesadaran. Ini harus menjadi pekerjaan semua orang.

Jadi, bagaimana memulai usaha-usaha memperbaiki lingkungan?

Banyak hal bisa dilakukan tanpa harus menunggu. Salah satunya kampanye melalui media sosial, antara lain lewat *twitter* dan *facebook*, seperti selama ini saya kerjakan. Melalui media ini saya bisa memiliki kawan hingga 15 ribu orang. Dari situ saya bisa menghimbau kepada kawan-kawan, mengenai masalah perbaikan diri hingga masalah-masalah menyangkut lingkungan.

Sungguh lingkungan hidup itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku dan moral. Bukan soal dosa atau tidak, tapi lebih ke

itu, orang memetik daun atau ranting saja bisa terkena denda yang tidak ringan. Sampai sekarang desa tersebut masih 100% asli.

Kegiatan lainnya, Lomba Karya Ilmiah Aplikatif 2012. Melalui lomba ini, kita berharap para pemenang bisa menyebarluaskan produk-produknya ke daerah-daerah melalui DPC-DPC Gerindra. Kalau itu bisa dilakukan, maka hasilnya akan sangat luar biasa.

Secara umum, seberapa besar kontribusi manusia dalam merusak alam?

Sangat besar. Bahkan kalau kita renungkan, semua itu berpulang pada diri kita sendiri. Andai setiap orang punya kesadaran untuk menjaga lingkungannya, tentu kerusakan alam tak akan pernah terjadi. Tapi begitulah kenyataannya. Seharusnya kita sedih melihat kondisi alam kita rusak akibat ulah manusia. Contoh, membuang sampah di sembarangan tempat atau buang puntung rokok sembarangan, selain asapnya bisa menjadi masalah tersendiri.

masalah disiplin diri. Kalau masalah ini kita perhatikan bersama, lambat laun pasti akan muncul kesadaran, seperti yang saat ini terjadi di belahan bumi yang lain.

Pembangunan selaras dengan pertambahan kerusakan lingkungan, pendapat ibu?

Seharusnya tidak sejalan. Jadi pemerintah harus lebih selektif dan ketat dalam pengawasan pembangunan di setiap titiknya. Jangan sampai pembangunan malah membuat kerusakan semakin parah dari segi lingkungan. Di sekitar kita masih sering ditemukan pembangunan mal di tengah kota, sedang di luar negeri diatur hanya dipinggiran kota saja.

Jadi, dalam hal ini kesalahan pemerintah, bagi saya, sama besarnya dengan kesalahan masyarakat. Mungkin peraturan kurang tegas, atau sanksinya tidak tegas. Sementara masyarakat juga sangat sulit mematuhi peraturan. ◀

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Waskita Rini
Alamat : Kebon Kosong 22 No. 200, Kemayoran Jakarta 10630
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 11 – 06 – 1966
Status : Menikah (1 anak laki-laki)
Pekerjaan : Independent Event Organizer
Pendidikan : S-1, Fak Sastra Inggris UNAS, Jakarta. Lulus Tahun 1991
S-2, HRD, World of Association of Universities and Colleges, 1999

PENGALAMAN DI GERINDRA

– Caleg DPR – RI Dapil Jateng 8 (Banyumas-Cilacap) No. Urut 3. Th 2009
– Kabid. Pendidikan PP PIRA, Th 2008-2009
– Wasekjen DPP Partai Gerindra, 2009-2010
– Kepala Dept. Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Desember 2010-sekarang

DPP PARTAI GERINDRA

Mudik Gratis 2013
Bersama Gerindra

TIGA hari jelang lebaran lalu, tepatnya Senin (5/8), sejak pagi buta kantor DPP Partai Gerindra di bilangan Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, didatangi ribuan masyarakat dari berbagai wilayah di Jakarta. Karuan saja, menjelang azan subuh itu terdengar suara riuh di seputar kantor partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Menariknya, mereka datang sembari membawa berbagai perbekalan, dalam bentuk dan ukuran masing-masing.

Kedatangan mereka ke kantor DPP Partai Gerindra tak lain adalah untuk mengikuti kegiatan mudik bersama. Tak tanggung-tanggung, kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP bersama Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini, hari itu, memberangkatkan sekitar 5000 pemudik dengan mengerahkan puluhan armada bus. Daerah yang dituju kegiatan mudik bersama tersebut, antara lain kota-kota di pantai utara dan jalur selatan Pulau Jawa.

Pemandangan pada dini hari itu karuan saja mengundang perhatian masyarakat di sekitar kantor DPP Gerindra. Tak terkecuali para pengendara kendaraan bermotor. Mereka terlihat memperlambat laju kendaraannya untuk melihat peristiwa yang terjadi. Situasi ini menyebabkan arus lalu lintas ditempat tersebut agak tersendat, meski tak sampai menimbulkan kemacetan.

Saat fajar mulai menyingsing, suasana semakin riuh. Terutama saat panitia membagikan tiket dan nomer tempat duduk. Seperti tak ingin ketinggalan bus, para peserta mudik gratis itupun saling berebut

untuk mendapatkan tiket dan nomer tempat duduk. Beruntung pihak panitia sigap mengantisipasi segala kemungkinan, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak diharapkan.

Pada pukul 08.00 para peserta mudik gratis, sembari menunggu keberangkatan ke kampung halaman masing-masing, para peserta dikumpulkan di ruang pertemuan bagian belakang kantor DPP. Di sini mereka mendapat berbagai hiburan, baik dalam bentuk *game* berhadiah maupun alunan lagu-lagu qosidah dan salawat. Selain itu ada juga acara joget dan bernyanyi bersama, serta bazaar murah berbagai makanan kecil dan pakaian.

Ketua Fraksi Gerindra yang juga Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dalam sambutan mengatakan, kegiatan mudik bersama ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Partai Gerindra terhadap masyarakat yang hendak merayakan lebaran di kampung halamannya. Selain kegiatan mudik bersama, menurut Muzani, kader dan simpatisan Gerindra juga mengadakan acara pembuatan 200 pos mudik, mulai dari Banda Aceh hingga Bima di NTB. Pos-pos mudik ini dilengkapi ambulans gratis. Di samping aksi pengobatan gratis, juga pembagian ta'jil gratis bagi mereka yang berpuasa.

Acara mudik gratis itu, kata Muzani, adalah kali kedua diselenggarakan Gerindra. Acara serupa dilaksanakan pada 2012, melibatkan 1.500 peserta menggunakan kereta api. Sedangkan tahun ini, acara mudik gratis



FOTO DOK. M. BUDIONO

dilaksanakan dalam dua periode. Pertama diberangkatkan Jumat (2/8), *start* dari Jln. Proklamasi Jakarta Pusat. Dan, periode kedua Senin (5/8) ini.

"Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengadakan mudik gratis lebih besar lagi. Itu pasti akan terlaksana jika Fraksi Partai Gerindra DPR RI dihuni oleh semakin banyak lagi anggotanya," kata Muzani diikuti tepuk para peserta.

Sementara Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof. Dr. Suhardi berharap, kegiatan mudik bersama bisa turut menyumbang penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang selalu terjadi pada setiap musim mudik. Ini penting, karena korban meninggal saat mudik sangat besar, yakni mencapai 100 korban meninggal setiap hari.

Kegiatan mudik bersama tersebut,

menurut Suhardi, merupakan wujud kepedulian dan kekhawatiran partai Gerindra terhadap besarnya korban kecelakaan mudik. Ke depan, Suhardi berharap, Gerindra bisa memenangkan pemilu 2014 sehingga dapat merealisasikan program pembuatan sarana transportasi yang aman. Yaitu menggunakan kereta api.

"Di Indonesia itu aneh, di mana-mana di dunia ini panjang rel terus bertambah, tapi anehnya di Indonesia malah berkurang," kata Suhardi mengenai kondisi perkeretapihan Indonesia. Saat ini, menurut Suhardi, panjang rel kereta tinggal 4.000 km dari sebelumnya sekitar 20.000 km.

"Nah, kalau Gerindra menang, tentu kita akan memilih alternatif moda transportasi kereta yang terbukti lebih aman," kata Suhardi memberi janji. ◀ MBO

PP GEMA SADHANA

Kader Gema Sadhana
Adalah Anggota Gerindra

UNTUK meningkatkan jalinan kerjasama dan konsolidasi di kalangan pengurus, Pimpinan Pusat (PP) Gema Sadhana mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Masyarakat Sanathana Dharma Nusantara. Acara tersebut berlangsung pada 6 - 7 Juli dan dibuka oleh Ketua Dewan Pembina PP Gema Sadhana Hashim S. Djojohadikusumo.

Rakernas ini diikuti perwakilan 21 PD Gema Sadhana, dan 48 kader Gema Sadhana yang maju sebagai calon legislatif DPRD tingkat I, II, dan DPR-RI. Turut hadir dalam acara itu: Dewan Pembina Partai Gerindra Permadi, SH.; Dewan Penasihat Partai Gerindra Martin Hutabarat; Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama; Pimpinan Gandhi Memorial School Suresh G. Waswani; serta tokoh-tokoh masyarakat Hindu dan Budha lainnya.

Ketua Umum PP Gema Sadhana A.S. Kobalen dalam sambutannya menghimbau, kader Gema Sadhana untuk dapat menghayati dan menyebarkan 6 Aksi Program Partai Gerindra serta dapat mewujudkan-nyatakannya. Ia mengingatkan, seluruh kader Gema Sadhana harus merapatkan barisan dengan segenap jiwa raga guna membuktikan komitmen menyumbangkan 1,5 - 2 juta suara kepada Partai Gerindra pada 2014.



FOTO-FOTO DOK. GEMA SADHANA

Selain itu, Kobalen juga menegaskan, kader Gema Sadhana adalah pejuang Dharma dan satria Dharma. Mereka mencalonkan diri sebagai calon legislatif secara terhormat, bersaing secara terhormat, dan menang secara terhormat. Karena itu, ia berharap, tidak ada satu pun kader Gema Sadhana memperlakukan nomor urut caleg. Karena nomor urut hanyalah tanda dan bisa disamakan seperti nomor dada untuk seorang pelari maraton. Yang menentukan dia juara 1 atau 2 adalah kecepatan larinya, bukan nomor yang terpasang di dadanya.

Sementara Ketua Dewan Pembina Gema Sadhana Hashim Djojohadikusumo mengingatkan, seluruh anggota Gema Sadhana adalah anggota Partai Gerindra. Karena itu, kader Gema Sadhana harus menonjolkan atribut

partai. Bila perlu seragam sayap-sayap partai disesuaikan dengan seragam partai.

Rakernas I Gema Sadhana yang dikemas dalam bentuk Rapat Kerja itu memberikan pembekalan politik kepada para peserta. Materi tentang Makna Pancasila disampaikan oleh tutor dari Lemhanas, yaitu Marsma TNI (purn) Abdul Gani, S.Ip. Lalu, materi Strategi Pemenangan Caleg oleh pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Dr. Emrus Sihombing.

Materi lainnya, Strategi Pemenangan dengan Sistem Sub Dapil disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prof. Dr. Ir. Suhardi, M.Sc; dan, Strategi Penjagaan Suara di KPU disampaikan oleh Sekjen DPP Ahmad Muzani yang juga menutup acara Rakernas tersebut. ◀ MBO



DPC KEPULAUAN MENTAWAI Perjuangkan Nasib Korban Mentawai

GEMPA bumi dan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan kepulauan Mentawai pada 25 Oktober tiga tahun lalu masih menyisakan penderitaan di kalangan para korban. Hingga kini mereka masih tinggal di rumah hunian sementara. Padahal rumah berdinding triplek dan beratap seng itu sudah tidak nyaman lagi untuk ditempati. Soalnya, sebagian besar dindingnya mulai lapuk akibat terpaan panas matahari dan hujan. Sementara rumah hunian tetap yang dijanjikan pemerintah tak kunjung terealisasi.

Tak tahan dengan kondisi seperti itu, 10 orang perwakilan warga Mentawai disertai dua kepala desa mewakili 2.072 kepala keluarga dari 8 desa di 4 kecamatan yang terkena dampak bencana, datang ke Jakarta untuk menagih janji. Rombongan tiba di Jakarta, Senin (26/8), didampingi Sudarmi Saugo, pengurus DPC Partai Gerindra Kepulauan Mentawai yang juga caleg DPRD Provinsi Sumatera Barat dapil Sumbar 8.

Tuntutan mereka bulat, minta pemerintah segera merealisasikan janji penyediaan hunian tetap bagi para korban. Untuk itulah, begitu

tiba di Jakarta, rombongan ini langsung menuju kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bertemu ketua BNPB Syamsul Maarif. Hasil pertemuan itu, menurut Sudarmi, pemerintah akan sesegera mungkin merealisasikan janji tersebut. Dan, Syamsul Maarif berjanji akan memimpin langsung pelaksanaan program tersebut, akhir Agustus ini.

“Semoga, semua ini menjadi titik terang bagi masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal hunian tetap yang sudah mereka tunggu sejak tiga tahun lalu,” begitu Sudarmi berharap.

Untuk memastikan rencana tersebut rombongan masyarakat Mentawai juga berusaha menemui Komisi VIII DPR RI yang membicarakan Kebencanaan, namun gagal karena rencana pertemuan itu belum diagendakan.

Akhirnya Sudarmi berharap: “Mewakili masyarakat korban bencana, kami berharap pemerintah pusat benar-benar memerhatikan masyarakat pesisir Mentawai, baik masalah hunian tetap maupun pembangunan ekonominya.” ◀ **MBO**

DPD GERINDRA SUMUT Menuju Kemerdekaan Sebenarnya



PERINGATAN HUT ke-68 Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan seluruh jajaran masyarakat di seantero negeri, tak terkecuali pengurus dan kader DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Pada hari itu, Sabtu 17 Agustus 2013, DPD Gerindra Sumut melaksanakan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia di kantor DPD Partai Gerindra Sumut, Jalan Patimura.

Dalam amanatnya, Ketua DPD Partai Gerindra Sumut H. Gus Irawan Pasaribu selaku pembina upacara mengatakan, tingginya kemiskinan ditambah besarnya penguasaan asing terhadap sektor-sektor penting menunjukkan jika kemerdekaan dalam arti sesungguhnya masih belum tercapai. Padahal 68 tahun lalu, para pejuang Indonesia merebut kemerdekaan melalui perjuangan yang luar biasa, disertai pengorbanan yang sangat besar, baik harta maupun jiwa.

“Dimanakah posisi kita saat ini? Apakah cita-cita kemerdekaan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan rakyat yang sejahtera sudah tercapai?” begitu bunyi pertanyaan Gus Irawan, yang dijawab dengan menyoroti angka kemiskinan yang seperti disampaikan pemerintah yang kini menurun hingga 11,37%.

Ukuran yang digunakan pemerintah dalam hal angka kemiskinan ini berbeda dengan yang dikeluarkan Bank Dunia. “Jika saja standar atau ukuran Bank Dunia yang dipakai, dimana masyarakat berpendapatan kurang dari US\$ 2 per kapita per hari masuk kategori miskin, maka tingkat kemiskinan yang sesungguhnya bisa mencapai 50%,” papar Gus Irawan.

“Kita masih terjajah, paling tidak secara ekonomi,” ungkap Gus Irawan lebih lanjut. Bukti menunjukkan, sektor-sektor ekonomi, teknologi dan sektor telekomunikasi dikuasai asing. Peralatan yang kita gunakan dan juga sumber daya alam telah dikuasai oleh asing. “Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merdeka dalam arti sesungguhnya. Ini menjadi tugas kita sebagai kader Gerindra untuk memerdekakan bangsa ini,” ajaknya.

Gus Irawan juga mengingatkan, agar kader Gerindra bersama-sama masyarakat wajib mengisi kemerdekaan. Apalagi partai Gerindra telah memiliki *grand strategy* dalam bentuk 6 Program Aksi untuk membawa Indonesia keluar dari berbagai persoalan tersebut. Namun program aksi itu hanya dapat dijalankan jika partai Gerindra mampu memperoleh kemenangan dalam pemilu yang dilangsungkan tahun depan. ◀ **MBO**



Fadli Zon Sumbang Perpustakaan SD Cibereum 1 Cisarua

MESKI kini sibuk dengan berbagai kegiatan, tapi **Fadli Zon** tak pernah melupakan almateranya semasa masih duduk di sekolah dasar. Lelaki asal Sumatra Barat kelahiran Bogor, Jawa Barat, ini ternyata adalah alumni Sekolah Dasar (SD) Cibereum I, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, pada sekitar pertengahan Agustus lalu -- masih dalam bulan Syawal 1434 Hijriah -- Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra ini meluangkan waktunya melakukan reuni dan sekaligus

ber-halal bi halal dengan guru dan temannya semasa masih di SD Cibereum tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Fadli Zon yang juga calon legislatif (Caleg) Parta Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor juga menyumbangkan satu perpustakaan kecil untuk sekolah dasarnya tersebut. Pemilik dan pendiri *Fadli Zon Library* ini tercatat sebagai murid di SD Cibereum I dari 1978 hingga 1984. ◀ **AGT**



DPD GERINDRA JAMBI Posko Kesehatan Indonesia Raya

TAK kurang dari 200 posko kesehatan didirikan para kader dan simpatisan Partai Gerindra, mulai dari Aceh hingga NTB selama musim mudik lebaran 2013. Sebagian dari posko itu didirikan DPD Gerindra Jambi. Upaya ini dilakukan, menurut Bustami, koordinator posko arus mudik DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi yang juga Ketua UKK DPD Partai Gerindra adalah untuk membantu masyarakat yang hendak mudik melalui jalur darat.

Menurut Bustami, posko kesehatan itu didirikan untuk menyikapi dan membantu masyarakat yang terlibat dalam kegiatan arus mudik lebaran. Sekaligus turut serta dalam upaya yang dilakukan secara serempak oleh partai Gerindra untuk menyiapkan posko

keamanan. Untuk Jambi sendiri, posko tersebut difokuskan di jalan lintas timur dan tengah Sumatera.

Untuk jalan lintas timur, kata Bustami, titik-titik posko berada di kawasan Tempino, Simpang Rimbo, Sengeti, Merlung, dan Taman Raja di Tanjung Jabung Barat. Di titik lintas tengah terletak di Singkut, Kota Bangko, Bukit Uncong di Kota Bungo, lalu di Rantau Ikil perbatasan Sumbar.

Di lintas kota Jambi-Bungo posko didirikan di Tembesi dan satu lagi di Muara Kelih Tebo. “Total ada 12 titik dan setiap titik kita siapkan ambulans. Kita mengantisipasi masyarakat yang kecapekan di jalan agar bisa istirahat di posko Gerindra,” jelasnya. ◀ **MBO**



Semula Anas Ridwan hanya memproduksi sandal gunung. Kini, usahanya kian berkembang. Selain sandal gunung, ia juga memproduksi perlengkapan olahraga air dan pernak-pernik petualangan lainnya.

OLEH AGUSTAMAN

Bermula dari SANDAL GUNUNG

SEBUAH perahu (sekoci) karet merek "Boogie" bertengger di atas kapal layar tradisional Jukung Bali milik seorang petualang laut, Effendy Soleman (62). Tampak Effendy, seorang diri, mengemudikan perahu menempuh perjalanan laut dari Bali menuju Brunai Darussalam. Peristiwa itu, tentu saja, membuat Anas Ridwan bangga. Sebab, perahu karet "Boogie," adalah produksi perusahaan milik Anas. Dan, dialah yang menjadi sponsor kegiatan tersebut.

Melakukan kegiatan *below the line*, seperti mensponsori kegiatan pecinta alam, memang merupakan salah satu cara pemilik PT. Boogie Advindo menerobos pasar yang lebih besar. Sebelumnya, Boogie juga menjadi sponsor beberapa kegiatan serupa, salah satunya kegiatan International Kayak Festival di Asahan, Sumatera Utara (2002). Boogie juga membina atlet-atlet pecinta alam terbaik nasional.

Anas dan manajemen juga sudah mengembangkan usaha dengan membuka *Boom Adventure* di daerah aliran sungai Palayangan-Pengalengan, Jawa Barat, meliputi: arung jeram, kayaking, paralayang, sepeda gunung, *treking*, *canoing*, *banaboat* dan *war games*. Tujuannya tentu saja untuk lebih memasyarakatkan produk Boogie.

Di kalangan pecinta alam dan penghobi kegiatan *outdoor*, Boogie bukanlah nama asing lagi. Perusahaan ini adalah salah satu produsen peralatan petualangan alam bebas (*outdoor*) dan olahraga alam yang terbesar di Indonesia. Boogie memiliki pengalaman dalam memproduksi peralatan petualangan alam bebas selama lebih dari 21 tahun.

Kualitas produk anak bangsa ini tidak kalah dibanding produk impor. Bukan karena sebagian besar bahan bakunya masih dari impor, tapi dari segi mutu memang bersaing. Selain perahu karet, perusahaan ini juga memproduksi sandal gunung, tas, ransel, pelampung, *drybag*, sepatu, kantung tidur, dan beberapa produk dan aksesoris kegiatan alam bebas lainnya.

Semua produk itu adalah bukti kesuksesan Anas dalam "mengawinkan" hobi dengan bisnisnya. Meski ia harus mencurahkan segala perhatian untuk mengembangkan usahanya -- di pabriknya di kawasan Kedung Halang Bogor -- tapi pria 38 tahun sebagai anggota pecinta alam dan penempuh rimba Wanadri ini masih saja berkutat dengan kegiatan alam bebasnya.

"Bagi saya, bisnis ini lebih dari sisi nilai tambah suatu produk, bukan semata-mata uang," ujarnya. Ia menyadari betul, dia tidak punya bakat berdagang. "Motivasi saya sebenarnya adalah punya aktivitas yang menghasilkan. Juga, ingin membuktikan anak gunung pun bisa berhasil," tegas alumnus Akademi Pimpinan Perusahaan (1992) ini.

Dari Sandal ke Perahu Karet

Bapak satu anak ini bercerita, ia mengawali bisnisnya pada 1990 dengan mencoba membuat tiruan sandal gunung merek *Teva* -- sebuah produk yang pernah ia saksikan, dan dipakai oleh para penerjun payung dalam berkompetisi di pantai Kuta, Bali. Dengan modal Rp 100 ribu, ia kemudian meminta seorang tukang sol keliling membuat sandal gunung

menyerupai *Teva*.

Sejak itu, dengan bantuan seorang tenaga kerja, Anas memproduksi tiga pasang sandal gunung setiap hari. Sandal "Teva palsu" ini lalu dijajakan di kalangan teman-teman, sesama pecinta alam. Meski jiplakan, sandal produksi Anas ternyata laku dijual. Empat bulan kemudian, ia mencoba meningkatkan kapasitas produksi dengan mempekerjakan lima tukang sol. Produksinya pun meningkat menjadi sekitar 15 pasang/hari. Begitu seterusnya, selama dua tahun ia memfokuskan produksinya pada sandal gunung. Hingga kemudian, tukang solnya mencapai 15 orang dan mampu produksi 50 pasang/bulan pada tahun kedua.

Pada tahun ketiga usia perusahaannya, ia mengembangkan usahanya dengan memproduksi tas ransel, *drybag*, dompet, sepatu *treking*, pelampung, tenda, dan berbagai aksesoris kegiatan pecinta alam. Tahun 1996, ia berani memproduksi perahu karet. Padahal, jarang ada perusahaan yang mampu memproduksi perahu karet seperti itu. Bahkan, saking langkanya, ketersediaan perahu karet untuk olahraga arung jeram sangat terbatas.

Untuk memproduksi perahu karet, pria kelahiran Bogor ini rela

terbang ke Taiwan guna menimba ilmu. Namun, tak ada kesempatan mengembangkannya, sehingga ia melirik perusahaan sepatu yang memproduksi perahu karet penyelamat dan arung jeram, PT Heejo Indo. Anas kemudian menjadi penyalur perahu arung jeram produksi perusahaan tersebut.

Impian membuat perahu karet akhirnya kesampaian atas bantuan seorang karyawan Heejo Indo, dan ia mulai dengan modal Rp 5 juta. Tapi, celaknya, teman-temannya ragu menggunakan perahu buataannya. Untunglah, seorang warga negara Australia -- karyawan sebuah perusahaan pertambangan di Kalimantan -- membeli tiga perahu karet buatan Anas berikut perlengkapannya.

Hampir bersamaan dengan itu, Heejo Indo bangkrut. Seluruh peralatan perusahaan ini dibeli Anas dan beberapa karyawannya direkrut ke Boogie Advindo. Untuk produksi, Anas mengeluarkan dana Rp 25 juta buat membangun ruang oven, sebuah alat yang mutlak diperlukan dalam membuat perahu karet. Hanya dalam tiga tahun, Boogie Advindo berhasil memproduksi 90 perahu karet, dan laku terjual 20-30 unit/tahun dengan harga US\$ 1.000/unit.

Sejak itu, ia mulai meraih keuntungan. Pesanan perahu karet dari beberapa operator arung jeram di Jawa, Bali, Aceh, Toraja, dan bahkan Malaysia mulai berdatangan. Hebatnya, ia mampu menyelesaikan order-order ini hanya dalam lima hari, meskipun harus menjahitnya sendiri.

Namun, kontributor terbesar pendapatan Boogie Advindo tetap berasal dari sandal gunung (40%), diikuti tas (40%), dan 20% dari jenis produk lain seperti aksesoris, tenda, pelampung, dan perahu karet. Sedangkan pasarnya, 60% dari total produksinya terjual ke wilayah Jawa dan sisanya dipasarkan ke Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Untuk ekspor, meskipun bersifat insidental, pasar terbesarnya adalah Malaysia, Singapura, Jepang dan Australia.

Kini, penyandang Master Administrasi Niaga UI ini juga sudah membuka gerai dengan pola waralaba di beberapa daerah di Indonesia. Sementara untuk kesejahteraan lebih dari 70 orang karyawannya, ia Anas membangun perumahan berlokasi di dekat pabrik Boogie.

"Bagi kami, untung besar nomor sekian. Yang penting, kesinambungan usaha," jelas Anas yang masih merahasiakan omset usahanya. ◀



Anas Ridwan



Salah satu produksi Boogie

Caleg Gerindra Senandung Artis Gerindra

TUGU Proklamasi Jakarta di pertengahan Agustus itu sangat cerah. Sejumlah calon anggota legislatif dari Partai Gerindra sudah berkumpul untuk pengambilan gambar lagu ciptaan Fadli Zon berjudul "Gerindra Menang, Indonesia Jaya". Patung Proklamator Soekarno dan Hatta yang sedang membacakan teks proklamasi jadi latar belakang dihiasi bendera merah putih.

Mereka yang terlibat adalah Derry Drajat, Hemalia Puteri, Nuri Shaden, Irwansyah, Jamal Mirdad, Tessa Mariska dan Fadli Zon sendiri. Lagu yang musiknya diciptakan oleh Idris Sardi itu berbicara tentang keindahan Indonesia. "Negeri indah permai, aman dan damai, warisan pusaka, bumi nusantara," begitu bait pertama berbunyi. Lagu dinyanyikan dalam irama dangdut, pop dan seriosa.

Tessa Mariska yang membawakan dalam irama dangdut tampak paling bersemangat. Mungkin karena dia datang paling pagi. Selanjutnya Derry yang menyanyikan dalam irama seriosa. Tubuhnya yang tinggi besar tepat membawakan lagu ini. Meski mengaku tidak hapal teksnya, pemain sinetron ini berusaha keras menghafal sebelum pengambilan gambar. Dia bernyanyi bersama anak-anak yang sedang bermain di Tugu Proklamasi. Suasana pun ceria, anak-anak tampak senang karena bernyanyi bersama artis yang wajahnya sering mereka lihat di televisi.

Sambil menunggu giliran, para artis rela duduk di bangku tembok yang ada di sana. Hemalia Puteri bahkan tampak merias sendiri wajahnya sebelum tampil. "Saya sudah bangun pagi. Ternyata acaranya siang," katanya tersenyum dan mematut muka di depan cermin. Sementara Derry yang tak kalah semangat mengaku rela datang tanpa banyak fasilitas. "Ini kan demi Partai Gerindra," katanya. ◀ IF



FOTO ANDI NUR HAMDI

Fadli Zon

Panelis Aktif di Forum Negarawan Asia

BERTEMPAT di The Fairmont Makati, Manila, Filipina, 7-9 September 2013, berlangsung acara Forum Negarawan Asia ke-12 (*12th Asian Statesmen's Forum*). Salah seorang panelis aktif di forum itu adalah **Fadli Zon**, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Panelis lainnya, antara lain: Yoshimasa Hayashi, Menteri Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jepang.

"Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai politik dari Indonesia yang diundang pada pertemuan yang digagas oleh National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Jepang itu," jelas Fadli yang juga calon legislatif Partai Gerindra untuk dapil Kabupaten Bogor.

Forum ini dibuka secara resmi oleh Prof. Takashi Shiraishi selaku Presiden GRIPS. Tampak hadir dalam kesempatan itu para tokoh, para ahli dan intelektual dari Asia Tenggara dan Negeri "Sakura" Jepang. Salah seorang diantara yang hadir itu adalah Menteri Pertanian Filipina Proceso Alcala.

Fadli menuturkan, forum ini membahas berbagai masalah, seperti konflik di laut China Selatan, kelangsungan energi (*energy sustainability*), *middle-income trap*, serta prospek ekonomi di Asia Tenggara dan Jepang.

"Forum ini juga menjadi ajang untuk *networking* antara para tokoh politik, intelektual di Asia Tenggara dan Jepang," tutur Fadli yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini. ◀ AGT

FOTO DOK. FADLI ZON LIBRARY

Ario Bayu

Sempat Menolak Memerankan Soekarno

SEBENTAR lagi Indonesia akan punya film tentang Soekarno. Film yang disutradarai Hanung Bramantyo ini akan diperankan oleh aktor Ario Bayu. Untuk memerankan sosok bapak bangsa ini, Ario pun tidak bisa sembarangan main. Dia harus bertemu dengan keluarga Soekarno. "Saya sempat ketemu dengan Ibu Rahmawati, sempat menanyakan beberapa pertanyaan. Kita tahunya dia bapak Presiden pertama, proklamator, dan figur itu yang kita kenal selama ini. Pas saya ngobrol sama Ibu Rahma ternyata ada jawaban-jawaban yang lain," kata Ario.

Ario yang pernah belajar akting di Inggris ini mengaku sempat menolak untuk memerankan Soekarno. Bukan apa-apa, Soekarno sudah menjadi milik 250 juta orang Indonesia, yang kharismanya dikenang sepanjang masa. "Sempat gue enggak mau. Jadi kalau misalnya saya enggak bisa memerankan sesuai dengan Soekarno, jadi stres juga," ujarnya.

Namun akhirnya Ario percaya pada tim yang ada. "Kalau saya bisa membuka sedikit karakternya Soekarno, bahwa ide di dalam Soekarno itu bisa memberi inspirasi atau bisa mengubah persepsi satu bangsa, itu yang menurut saya energi yang luar biasa," tuturnya. ◀ IF

FOTO ISTIMEWA



Mafia Migas Itu



Barang bukti operasi tangkat tangan suap Rudi Rubiandini

FOTO ISTIMEWA

SETELAH Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi VII menggelar rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Dalam rapat ini Jero dicecar soal mafia Migas dan berbagai dugaan seputar penyelewangan dana lainnya. "Saya hanya mengajukan satu pertanyaan kepada saudara Menteri. Sebenarnya mafia Migas itu ada atau tidak?" kata anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Saifuddin Donojoyo. Pertanyaan Saifuddin --yang sebelumnya duduk di Komisi VIII dan Komisi VI -- itu namun langsung kepada inti persoalan yang menjadi isu selama ini.

Hal ini seiring dengan sikap Fraksi Partai Gerindra yang sangat peduli terhadap ketahanan energi nasional sekaligus mengutuk perilaku korup para pejabat negara, terutama yang mengurus soal Migas. Hingga akhir rapat tidak ada kejelasan soal Migas itu. Namun Komisi VII dan Menteri ESDM mengambil kesimpulan, yakni dalam rangka reformasi birokrasi kelembagaan SKK Migas, Komisi VII meminta kepada Menteri ESDM untuk membuat laporan terhadap seluruh aset SKK Migas.

Komisi VII juga meminta Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan mekanisme anggaran SKK Migas yang harus melalui APBN.

Kesimpulan selanjutnya adalah, kedua belah pihak bersama-sama akan segera menyelesaikan revisi Undang-Undang No. 2/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. ◀ IF

Alokasi Anggaran Kurang Mendidik

PEMERINTAH sudah menyampaikan Rancangan APBN 2014 dan Nota Keuangan yang dibacakan langsung oleh presiden di depan sidang paripurna parlemen, 16 Agustus 2013. Banyak pandangan diberikan oleh anggota dewan. Namun Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan kritis atas RAPBN tersebut. Dalam soal penanggulangan kemiskinan tahun 2014, misalnya, pemerintah merencanakan program Bantuan Tunai Bersyarat melalui berbagai cara. Dalam RAPBN dialokasikan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp 5,2 triliun. Menurut Gerindra, program ini kurang mendidik karena tidak berkelanjutan. "Rakyat sejatinya membutuhkan lapangan kerja yang layak, bukan program instan," kata Sumarjati yang membacakan pandangan fraksi dalam rapat paripurna.

RAPBN juga rawan penyelewangan, sebab korupsi terjadi di semua tingkatan, baik pemerintah pusat hingga ke daerah. Data menunjukkan bahwa 173 kepala daerah (37%) tersangkut masalah korupsi. "Atas dasar itu, agenda pemberantasan korupsi harus menjadi agenda utama. Apalagi pemerintah akan mengalokasikan dana sebanyak lebih dari Rp 300 triliun dalam RAPBN 2014 untuk tujuh kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum Rp 74,9 triliun, Kementerian Agama Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 44,9 triliun, Kepolisian Rp 41,5 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp 39,2 triliun.

"Karena hampir rata-rata eksekutif yang berada di pemerintahan adalah orang partai politik, dan memiliki tanggung jawab untuk membantu kelangsungan berbagai kepentingan partai politik," lanjut Sumarjati. Karena itu, Fraksi Partai Gerindra berharap, DPR bersama BPK dan KPK bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemegang amanah rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab.

Anggaran penerimaan pemerintah 2014 sudah ditetapkan sebesar 1.662,5 triliun atau naik sekitar 10,7% dari tahun 2013 sebesar Rp 1.502,0 triliun. Sebagian besar penerimaan diproyeksikan berasal dari sektor pajak sebesar Rp 1.310,2 triliun atau naik 14,1% dari 2013 sebesar Rp 1.148,4 triliun. Menurut Gerindra, konsekuensi dari target penerimaan APBN yang mengandalkan pajak bisa menyebabkan segala aktivitas kehidupan rakyat terkena pajak. Dampaknya akan membuat ekonomi biaya tinggi dan beban akan ditanggung rakyat. ◀ IF

Pemerintah Harus Perhatikan Korban Rokatenda

SAAT ini, banyak masyarakat pengungsi korban letusan gunung Rokatenda di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih memerlukan uluran tangan, agar mereka bisa bertahan hidup. Karenanya, anggota dewan dari Dapil NTT Fary Djemi Francis meminta perhatian dari pemerintah pusat. "Saat ini banyak terdapat masyarakat pengungsi dari korban bencana alam letusan gunung Rokatenda yang masih memerlukan uluran tangan, untuk membantu mereka bertahan hidup," ujar Fary.

Semestinya, menurut Fary, pemerintah pusat tidak lepas tangan begitu saja dalam persoalan ini. Sehingga, mana kala Pemda setempat kurang cepat dan terbatas kemampuannya dalam menangani korban bencana alam, pemerintah pusat tidak tutup mata. "Pemerintah harus segera turun tangan," pinta Fary yang juga anggota Komisi V membidangi masalah perhubungan dan infrastruktur.

Menurut Fary, pemerintah pusat dengan segala perangkat yang dimilikinya, memiliki kewenangan besar untuk menggerakkan dan memerintahkan percepatan penanganan korban di sana. Jadi, penanganan korban bencana letusan gunung Rokatenda ini tidak sebatas evakuasi, tapi juga membuat penampungan sementara untuk korban bencana, dan memberikan bantuan kemanusiaan.

"Itu semua butuh campur tangan dari pemerintah pusat nantinya, dalam *recovery* dan rekonstruksi ulang pasca bencana tersebut. Itu semua memerlukan anggaran yang besar. Sehingga, jika anggaran Pemda terbatas, pemerintah pusat harus campur tangan dengan dukungan anggaran untuk kepentingan hal itu," pungkasnya. ◀ IF



Pengungsi Rokatenda

FOTO ISTIMEWA

profil



Aryo Puspito Setiaki Djojohadikusumo

FOTO DOK. PRIBADI

Melalui sebuah Yayasan Arsari Djojohadikusumo, Aryo Djajohadisusumo turun membantu warga.

OLEH IMAN FIRDAUS

Dari Yayasan Buat Warga Jakarta

SAAT menyambangi Yayasan A. Djojohadikusumo yang terletak di Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat, tak banyak perabot ditemui. Persis setelah pintu masuk terdapat sebuah meja *letter L* dan dua buah kursi yang diletakkan persis di meja resepsionis. Selebihnya, hanya hamparan karpet berwarna abu-abu dan tiga buah kipas angin yang terlihat. *Setting* ruangan yayasan sengaja tidak membuat sekat bagi siapapun yang datang.

Kini, yayasan itu hadir di Jakarta Barat untuk lebih mendekatkan beragam pelayanan sosial kepada masyarakat tidak mampu. Layanan sosial yang diberikan antara lain, kesehatan, pembuatan akte kelahiran maupun pembuatan KTP. Seluruh layanan sosial itu diberikan secara gratis. Khusus di wilayah Jakarta, kegiatan sosial dikelola oleh Aryo Djojohadikusumo—putra sulung Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo

Setibanya di yayasan, setelah menyapa dan bersalaman, Aryo langsung menyeduh teh sendiri. Tak lama kemudian, segera bergabung dengan kami yang sudah lebih dulu duduk lesehan. “Wanginya enak. Jadi lapar nih,” kata Aryo begitu mencium aroma wangi masakan dari dapur yayasan.

“Makan siang tiba,” kata seorang anak muda yang keluar dari dapur sambil membawa beberapa makanan. Menu tumis kangkung, telur ceplok, ikan, sambal terasi tersaji di tengah-tengah kami. “Ayo kita makan dulu,” kata Aryo seraya mengajak makan.

Di sela-sela makan, Aryo membuka obrolan santai dengan *Gema Indonesia Raya*. Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (Tidar) itu menuturkan, kiprah Yayasan A. Djojohadikusumo sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1990-an.

“Tahun 2006 mulai berbadan hukum se-

bagai yayasan Keluarga Hashim Djojohadikusumo. Kemudian sejak tahun 2009 namanya diubah menjadi Yayasan A. Djojohadikusumo. Mulai tahun ini saya aktif membantu yayasan, khusus DKI,” tutur lajang kelahiran 25 April 1983 ini.

Sejak awal berdiri, kata Aryo, Yayasan A. Djojohadikusumo konsen pada kegiatan sosial, kependudukan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, lingkungan hidup sampai pelestarian budaya.

Di wilayah Jakarta, Aryo melanjutkan, Yayasan A. Djojohadikusumo fokus pada pengadaan layanan sosial dan membantu masyarakat miskin guna mendapatkan dokumen kependudukan. Guna menguatkan peran dan misi sosial, Aryo menjelaskan, yayasan akan membuka 107 pos layanan yang dioperasikan di berbagai wilayah di Jakarta.

“Kita bantu kepengurusan dokumen kependudukan, karena banyak sekali warga Jakarta yang tinggal di wilayah ilegal, *grey area*. Dan sejak 2004 sudah 12 ribu akta kelahiran warga yang berhasil diurus,” ujar pemilik nama Aryo Puspito Setiaki Djojohadikusumo, ini memberi alasan.

Menurut Aryo, dokumen kependudukan merupakan hak masyarakat yang seharusnya bisa mendapat pelayanan dengan mudah. Akan tetapi, setelah dirinya melihat langsung kenyataan di lapangan, banyak warga Jakarta yang belum sepenuhnya mempunyai dokumen kependudukan, misalnya saja Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran.

“Ini sangat besar pengaruhnya. Contohnya saja, di kawasan pelelangan ikan Muara Angke. Ada daerah yang sejak negara ini merdeka tidak punya RT dan RW, bahkan KTP. Bagaimana mau menikmati kesehatan dan pendidikan gratis kalau tidak punya KTP? Melihat hal itu, kami segera bergerak mengu-

rusnya,” tukas Aryo.

Daerah itu, kata Aryo menjelaskan, dulunya dikenal sebagai Kampung Ambang Batas Laut (Ambalat) yang terletak di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan, Yayasan A. Djojohadikusumo sudah sejak tahun silam mendampingi masyarakat di Kampung Ambalat.

“Kami bersyukur, kawasan Kampung Ambalat kini mempunyai beberapa RT dan RW. Pihak Yayasan A. Djojohadikusumo, Camat dan Lurah saat itu bersama-sama ikut meresmikan kehadiran RT dan RW. Camat yang hadir juga berjanji akan mengubah nama Kampung Ambalat sesuai aspirasi masyarakat,” jelas Aryo.

Masalah sosial lainnya juga ditemui di Kampung Beting, Koja, Jakarta Utara. Kawasan padat penduduk itu, Aryo menggambarkan, bukan hanya perkara administrasi kependudukan saja. “Di daerah itu, dulu sering terjadi berbagai kasus *trafficking* (perdagangan anak), pekerja seks komersial (PSK). Ya, karena faktor kemiskinan. Tetapi setelah kami bergerak, membantu mereka, mulai dari kesehatan, kependudukan sampai pendidikan, kasus itu jarang muncul lagi,” kenang Aryo.

Kasus yang sama juga terjadi di kawasan Cilincing dan Marunda, Jakarta Utara. Umumnya, Aryo mengungkapkan, masalah yang ditemui di dua kawasan tersebut adalah minimnya akses kesehatan. “Sebab itu kami membantu mereka dengan menyediakan berbagai layanan kesehatan yang dibutuhkan serta *ambulance* gratis yang bisa mereka gunakan. Karena masalahnya berbeda-beda, bentuk bantuannya pun tidak sama,” ungkap Aryo mengisahkan beragam persoalan sosial yang dihadapi masyarakat miskin.

Terjun ke Pentas Politik

Selain aktif sebagai pengurus Yayasan A. Djojohadikusumo, saat ini Aryo menjadi calon legislator (caleg) DPR RI dari Partai Gerindra nomor urut 1 dari daerah pemilihan Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu.

Ia merasa terpanggil untuk terjun ke politik, salah satu alasannya adalah agar bisa menghasilkan berbagai aturan (regulasi) yang berpihak kepada masyarakat. Dalam pandangan Aryo, politik merupakan sarana strategis untuk bisa mengambil keputusan-keputusan penting yang menyangkut kebangsaan, kenegaraan, kebudayaan, ekonomi maupun sosial.

“Terjun ke pentas politik, kalau bukan untuk masyarakat, buat siapa lagi?” tanya Aryo.

Sebelumnya, keponakan dari Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto itu dikenal sebagai pebisnis. Dalam pandangan Aryo, dunia politik tak ubahnya seperti mengelola bisnis. Hanya saja, kata Aryo, pengelolaan bisnis bertujuan meningkatkan keuntungan, sedangkan politik untuk seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Di bisnis, bagaimana meningkatkan keuntungan. Di dunia politik bagaimana mengefektifkan anggaran negara untuk pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” ucap Aryo.

Ia berjanji bila diberikan mandat menjadi wakil rakyat, dirinya akan memperjuangkan penggunaan anggaran untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Terjun ke politik bagi saya, memastikan bahwa anggaran digunakan maksimal untuk warga dan birokrasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan kekuasaan,” tegas Aryo. ◀

6 PROGRAM AKSI TRANSFORMASI BANGSA PARTAI GERINDRA (2014-2019)



1

Membangun Ekonomi yang Kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur

- Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta (3.500 dollar AS) menjadi Rp 60 juta (6.000 dollar AS) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan diatas 10 persen.
- Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0.41 menjadi mencapai 0.31) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85.
- Meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga mencapai ratio minimal 16 persen dari Produk Domestik Bruto dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil; menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran; dan mengelola utang pemerintah dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif.
- Mendorong peran swasta dalam perekonomian nasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah, industrialisasi, dan industri pengolahan.
- Menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.
- Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional.
- Membangun dan mengembangkan industri nasional:
 - transportasi darat (kereta api, mobil, dan sepeda motor)
 - transportasi laut (angkutan kapal laut dan angkutan sungai)
 - transportasi udara (pesawat terbang)
 - alat berat dan alat mesin pertanian.

2

Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan

- Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah.
- Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya.
- Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil.
- Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional.
- Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW).
- Membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (Delapan) Program Desa, yaitu:
 - Jalan, Jembatan, dan Irigasi Desa dan Pesisir
 - Listrik dan Air Bersih Desa
 - Koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Lembaga Keuangan Mikro
 - Lumbung Desa
 - Pasar Desa
 - Klinik dan Rumah Sehat Desa
 - Pendidikan dan Wirausaha Muda Desa
 - Sistem Informasi Desa dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa.
- Mendirikan Lembaga Tabung Haji.
- Mempercepat reforma agraria untuk meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.

3

Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi serta Pengamanan Sumber Daya Air

- Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedele dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
- Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal susu, telur, ikan, dan daging.
- Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang-sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang.
- Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton.
- Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW.
- Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti elpiji).
- Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air.
- Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau konsumen.

4

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Indonesia melalui Program Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya serta Olahraga

- Memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan dan budi pekerti.
- Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin.
- Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memajukan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal.
- Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja.
- Mengembangkan sekolah-sekolah agama dan pesantren mulai dari madrasah ibtida'iyah, tsanawiyah, dan aliyah.
- Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh.
- Memberantas perdagangan manusia dan membasmi peredaran serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi para pelakunya.
- Menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis.
- Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin.
- Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlarut.
- Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas, dan mengembangkan program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah.
- Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdikan di daerah miskin dan tertinggal.
- Melestarikan warisan budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa.
- Meningkatkan prestasi Tim Nasional sepak bola Indonesia.

5

Membangun Infrastruktur dan Menjaga Kelestarian Alam serta Lingkungan Hidup

- Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 3.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir.
- Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata.
- Merehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang-sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam.
- Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa.
- Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.

6

Membangun Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kuat, Tegas dan Efektif

- Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparaturnya melalui reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif.
- Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
- Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel.
- Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya termasuk para veteran dan pensiunan.
- Menempatkan 30 % perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.